

PAULUS HARIYONO ( EDITOR )

# MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

- **Sepintas Pendidikan di Indonesia**
- **Sistem Pendidikan di Negeri Belanda**
- **Demokratisasi Pendidikan, Mungkinkah ?**
- **Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )**

**Paul Suparno  
Anita Lie  
Darmaningtyas  
Tukiman Taruno  
Conny R. Semiawan  
St. Kartono  
Eric Rumondar  
Slamet Sutrisno  
dkk**

**MUTIARA  
WACANA**





**Drs. Paulus Hariyono, MT (editor)**

**MENDONGKRAK  
KUALITAS  
PENDIDIKAN**

**April 2008**

**Penerbit  
Mutiara Wacana**





**MENDONGKRAK  
KUALITAS PENDIDIKAN**

Drs. Paulus Hariyono, MT (editor)

Karikatur: Erik

Diterbitkan  
oleh Penerbit Mutiara Wacana  
Sronol Bumi Indah K-3  
Semarang 50269

---

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak  
Buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan  
cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik,  
termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis  
dari penerbit.

---

ISBN 979-15337-1-7



## KATA PENGANTAR

Sudah tidak kepalang tanggung bila kita saat ini menatap masa depan dengan lebih cermat. Kejelian dalam memprediksi persoalan masa depan merupakan persoalan yang sangat penting, karena bila prediksi meleset kegagalan dan keterpurukanlah yang akan diperoleh, ibarat dokter salah mendiagnose pasien. Bila ini terjadi tidak akan ada orang yang akan membantu kita. Sejarah telah membuktikan orang yang mampu menolong kita dari keterpurukan adalah diri kita sendiri. Karena itu "hidup jangan dipertainkan, dan 'permainan' jangan dihidup-hidupkan".

Keterpurukan bangsa saat ini adalah masalah ketidakjelian untuk mengetahui dan mengimplementasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan rakyat banyak saat ini, tetapi seakan-akan mereka telah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Sementara kritik dan saran berlangsung di sana sini. Gejala ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya bangsa ini masih belum mampu berdialog secara arif yang ujung-ujungnya terdapat pihak yang dikorbankan begitu saja. Dengan kata lain bangsa ini belum bergulat dengan demokrasi yang memiliki makna ringkas "dari rakyat untuk rakyat". Pemilu 2004 dielu-elukan sebagai sistim yang paling demokratis yang pernah dilakukan di Republik ini. Tetapi demokrasi tidak cukup dengan pemilu saja, masih ada ajang-ajang lain yang perlu diketengahkan prinsip demokratisnya.

Frans Magnis Suseno (2007) dalam sebuah seminar nasional di Semarang menyebutkan, peran politik terpenting saat ini untuk nilai-nilai kemanusiaan antara lain adalah: 1) persoalan demokrasi; 2) persoalan hak azasi manusia; 3) komitmen pada keadilan sosial; dan 4) keagamaan yang terbuka yang menunjang kebersamaan dalam pluralitas. Selanjutnya dikatakan, untuk mengatasi perlu dilakukan diskusi dan dialog di antara berbagai pihak.

Dengan demikian tersirat pengertian, berbagai pihak masih perlu saling introspeksi untuk melakukan komunikasi dan diskusi bila hendak menegakkan demokrasi serta nilai-nilai yang lain. Di bidang pendidikan diperlukan komunikasi dan diskusi antara pemimpin dan rakyat; sekolah, guru dan murid; dosen dan mahasiswa; dinas, yayasan dan kepala sekolah (perguruan tinggi); dan lain sebagainya.



Persoalan komunikasi dan diskusi di antara berbagai pihak dalam buku ini akan dibahas pada bagian pertama di bawah judul **Sistem Pendidikan yang Demokratis**. Dr. Paul Suparno telah mengamati diantara berbagai pihak komunikasi dan diskusi belum berlangsung dengan baik, baik di kelas, di sekolah, di tingkat yayasan, dinas dan tingkat nasional. Bila demikian, dapat ditebak akan banyak dijumpai kebijakan-kebijakan yang tidak mengena sasaran. Hal ini terbukti dengan ulasan yang diberikan oleh Anita Lie, Darmaningtyas, dan Tukiman Taruno. Kebijakan-kebijakan yang pernah lewat dalam buku ini paling tidak dapat dipetik suatu pelajaran.

Sebagai pembanding, pada bagian ini diketengahkan Sistem Pendidikan di Negeri Belanda oleh Eric Rumondor. Hal yang menarik dari sistem pendidikan di Belanda adalah bahwa sistem dibuat sedemikian rupa sehingga tampak luwes. Bahkan orang yang bersekolah di bidang kejuruan pada saat tertentu dapat melanjutkan sekolah pada bidang keilmuan (teori), sehingga mampu meraih gelar doktor. Inti pendidikan di sana adalah bagaimana memecahkan persoalan (hidup), bukan bagaimana mencari ijazah (maksudnya: melulu ijazah, tidak berkeinginan memetik ilmu pengetahuan) dan kemudian jabatan serta materi.

Seorang rekan yang telah lama bermukim di Belanda menuturkan kepada penulis, "Di Belanda orang mencoba menikmati hidup, asal orang bisa makan dan kebutuhan dapat dipenuhi secara cukup, maka sudah cukup bagi mereka (ini lebih kejawen, *urip sakmadya*, dibandingkan orang Indonesia yang telah materialistis, terlebih dengan cara korupsi). Orang bebas menentukan dirinya sendiri, sebagai misal bila orang ingin menyelesaikan studi sarjananya hingga 6 tahun tidak masalah, asalkan dengan alasan yang dapat diterima, dan orang lain harus menghargai keinginan itu".

Kemampuan seseorang diukur berdasarkan kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan permasalahan yang diajukan. Seorang rekan yang menyelesaikan doktornya di Belanda (S2 di Belanda juga) bercerita, ketika lulus ujian doktor rekan itu diminta melengkapi bukti-bukti kelulusan semasa S2, dan setelah lulus ujian doktor pihak universitas baru mengetahui bahwa ternyata dirinya sewaktu menyelesaikan S2 lulus dengan predikat *cum laude*. Ini



terjadi karena penyelenggara program tidak terlalu *ribet* dengan latar belakang seseorang, tetapi kemampuannya yang diuji.

Status sosial dan ekonomi bukan merupakan cita-cita seperti yang banyak dikejar-kejar oleh masyarakat Indonesia dan juga Amerika yang tampaknya sama-sama memiliki perilaku hedonisme, imbuhnya. Karena itu tidak heran bila seorang menteri keuangan di Belanda berangkat ke kantor dengan mengendarai sepeda, selain memang negeri Belanda dikenal sebagai "negeri sepeda" (dan juga beberapa kota di Eropa) karena tiap rumah tangga rata-rata memiliki minimal dua sepeda sebagai sarana transportasi.

Pada masa Orde Baru, dalam berbagai kesempatan, terlebih dalam penataran P4, orang Barat dilecehkan sebagai memiliki perilaku individualistik dengan konotasi negatif. Memang sepintas demikian, tetapi semangat individualistik di negara Barat itu sebenarnya adalah kemandirian, bukan egoistis. Semoga saja penangkapan yang keliru ini tidak ditiru beberapa rekan-rekan di Indonesia di kota-kota besar (bahkan sikap egois ini sekarang telah merambat di desa-desa juga). Bila orang Barat menolong dapat tanpa pamrih, tetapi kini di Indonesia orang serba pamrih, terlebih di kota besar. Tipu muslihat terjadi di sana sini. Bila tidak siap menipu, orang harus siap ditipu. Istilah Jawanya (Jayabaya), *jaman edan, yen ora edan ora keduman* (jaman gila-gilaan bila tidak gila-gilaan tidak kebagian).

Nilai-nilai di Indonesia dapat dikatakan sedang *chaos*, nilai-nilai Pancasila sudah luntur, nilai-nilai tradisional demikian pula, sementara nilai-nilai modern belum terhayati. Dalam situasi demikian, orang mengalami kebingungan bagai di persimpangan jalan. Akibatnya seperti yang dikatakan Darmaningtyas, kebijakan tentang pendidikan misalnya, tidak karu-karuan, awut-awutan (semrawut), tidak jelas sosok dan arahnya, hendak dibawa ke mana. Demikian juga manusia Indonesia tidak jelas sosoknya, mau meninggalkan tradisi, tetapi terhenyak ketika lagu *Rasa Sayange* dan *Reog Ponorogo* diserobot tetangga. Sementara dalam melakoni nilai-nilai modern terseok-seok.

Van Peeursen melihat tahap alam pemikiran manusia dimulai dengan alam pemikiran 1) mitis; 2) ontologis, dan kemudian 3) fungsionalisme. Alam pemikiran mitis menonjol dialami bangsa Indonesia pada masa lalu sebelum abad pertengahan (bukan berarti



saat ini tidak ada). Masa ontologis tidak pernah dialami bangsa Indonesia, karena saat itu bangsa Indonesia dalam masa penjajahan Belanda. Sedangkan di Barat masa ontologis dialami oleh masyarakatnya. Pada masa ini banyak dipelajari hakekat segala sesuatu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial maupun politik. Di bidang iptek banyak melahirkan temuan-temuan teknologi yang menjadi cikal bakal industrialisasi, modernisasi, dan kelak melahirkan alam berpikir fungsionalisme. Di bidang sosial-politik banyak lahir berbagai paham dan pemikiran tentang persoalan kemasyarakatan, sehingga menghasilkan paham individualisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain-lain.

Di Indonesia alam berpikir ini meloncat dari alam berpikir mitis langsung ke fungsionalisme, tanpa dialami masa ontologis. Karena itu pada era modern ini bangsa Indonesia masih rancu dalam memahami hakekat segala sesuatu, sehingga banyak terjadi salah kaprah di era modern ini. Bila terdapat banyak salah kaprah begini, maka segala sesuatunya menjadi amburadul.

Sebagai contoh, pendidikan pada hakekatnya adalah proses liberalisasi, yaitu proses untuk membebaskan persoalan hidup manusia secara nyata, bukan sekedar melulu mencari ijazah, dan ijazah untuk mencari status, gengsi, pekerjaan yang bersih-bersih (*white collar*) dan gaji yang tinggi (...ini sih liberalisasi untuk diri sendiri.., bukan liberalisasi untuk masyarakat dan bangsa). Akibatnya banyak orang mencari pekerjaan dengan tujuan untuk menumpuk materi, bukan untuk memecahkan persoalan hidup (masyarakat, bangsa dan negara).

Dalam proses belajar mengajar, Slamet Sutrisno mengatakan, saat ini guru sebagai transformator ilmu pengetahuan menyerupai kongsi ilmu (mengumpulkan ilmu pengetahuan, kemudian "dilemparkan" kepada murid). Seharusnya bukan itu yang terjadi, melainkan mengajarkan cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Salah kaprah semacam ini akan banyak dibahas dalam bagian kedua buku ini di bawah judul **Nilai-Nilai Pendukung**.

Generasi kanak-kanak sekarang mengalami era yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lahir berselimutkan globalisasi dan informasi. Konon sejak dalam kandungan jabang bayi telah mampu menyerap psikis di sekelilingnya. Bila dibina dengan baik, sampai usia 6 tahun sel otak anak-anak mampu berkembang pesat;



sampai usia 10 tahun sel otak anak-anak berkembang secara cukup. Perkembangan sel-sel otak ini melahirkan kemampuan menyerap informasi. Setelah usia itu perkembangan sel-sel otak tidak sepesat sebelumnya, bahkan bila tidak dirangsang sel-sel otak akan mati yang berarti suatu kemunduran dalam menyerap informasi dan belajar. Karena itu sampai anak usia 4-6 tahun sering disebut sebagai usia emas (*golden age*) yang membutuhkan bimbingan dan didikan secara khusus. **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** begitu orang sekarang menyebutnya, akan diulas oleh beberapa penulis yang pakar di bidangnya di bagian tiga buku ini.

Tentu buku ini tidak terlalu sempurna, karena sedemikian banyak persoalan pendidikan di negeri ini dan tentu keterbatasan para penulis untuk menjangkau semua persoalan itu. Namun dapat diyakini, para penulis buku ini memiliki secercah harapan yang dituangkan dalam tulisan-tulisannya, semoga ada perbaikan dalam pendidikan kita menuju sesuatu yang kita dambakan. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan bangsa Indonesia.

Semarang, April 2008  
Editor,

Paulus Hariyono



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	xi

### BAGIAN PERTAMA PANORAMA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Bab 1. Demokratisasi Pendidikan, Mungkinkah ? <i>Dr. Paul Suparno, Universitas Sanata Dharma</i> .....	3
Bab 2. Peran Publik dan Pemerintah dalam Memenuhi Hak Anak atas Pendidikan <i>Anita Lie, Ed.D</i> <i>Universitas Widya Manggala, Surabaya</i> .....	25
Bab 3. Dari Ujian Negara sampai Pelecchan di Warung Kopi ① <i>Dr. J.C. Tukiman Taruno, Konsultan UNICEF</i> .....	42
Bab 4. Pendidikan Nasional: Globalisasi versus Formalisasi ① <i>Darmaningtyas, Pengamat Pendidikan</i> .....	58
Bab 5. Yang Serba Mungkin Dalam Profesi Guru ② <i>Darmaningtyas, Pengamat Pendidikan</i> .....	78
Bab 6. Sistem Pendidikan Dasar dan Lanjutan di Negeri Belanda <i>Eric Rumondor, Technical University Delft, Netherland</i> .....	90



## BAGIAN KEDUA NILAI-NILAI PENDUKUNG

- Bab 7. Makna, Hakekat, dan Proses Pendidikan  
*Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo,*  
*Universitas Negeri Semarang*..... 109
- Bab 8. Salah Kaprah Pada Guru  
*Slamet Sutrisno, Universitas Gadjah Mada* ..... 132
- Bab 9. Mendidik di Tengah Arus Jaman  
*St. Kartono,*  
*guru SMA Kolese de Britto, Yogyakarta* ..... 141
- Bab 10. Kualitas Bangsa dan Pendidikan  
*Drs. Paulus Hariyono, MT, Unika Soegijapranata* ... 151
- Bab 11. Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Berisiko  
*Prof. Dr. Mulyono Abdurrahman,*  
*Universitas Negeri Jakarta* ..... 174
- Bab 12. Pendidikan Moral di Sekolah Dasar  
① *Dr. St Soejanto Sandjaja, Unika Soegijapranata* ..... 190

## BAGIAN KETIGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Bab 13. Menggali Potensi Anak Berbakat  
*Prof. Dr. Conny R. Semiawan,*  
*Universitas Negeri Jakarta* ..... 199
- Bab 14. Mengenali Anak Cerdas Istimewa  
*Dr. Endang Widyorini, Unika Soegijapranata* ..... 216
- Bab 15. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini  
Melalui Kegiatan Bermain  
*Juliani Siantayani, MPd.*



<i>Direktur Sekolah Bukit Aksara, Semarang</i> .....	224
Bab 16. Perkembangan dan Pembelajaran Anak Usia Dini	
② <i>Dr. St Soejanto Sandjaja, Msi,</i>	
<i>Unika Soegijapranata</i> .....	242
Bab 17. Mengajar dengan Metode PAKEM	
② <i>Dr. Tukiman Taruno, konsultan UNICEF</i> .....	250
Bab 18. Sekilas Pengalaman Pekerja Sukarela di Sekolah Dasar di Negeri Belanda	
<i>Yvonne S. Mulyati, pekerja sukarela</i> <i>di Sekolah Dasar dengan metode Freinet,</i> <i>Belanda</i> .....	257

#### DAFTAR PUSTAKA

#### RIWAYAT HIDUP PENULIS



**BAGIAN PERTAMA**

**SISTEM**

**PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS**



# BAB 1

## DEMOKRATISASI PENDIDIKAN, MUNGKINKAH ?

Dr. Paul Suparno  
*Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*

*- Ilmu pengetahuan pada hari ini  
akan menjadi teknologi hari esok (Edward Teller) -*

### A. PANORAMA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Apa yang terjadi dengan pendidikan di Indonesia sekarang ini? Hampir setiap surat kabar di Indonesia, baik harian lokal maupun nasional membicarakan tentang pendidikan, menyediakan khusus rubrik pendidikan. Lebih-lebih bulan Mei, saat mengenang hari Pendidikan Nasional, hampir setiap surat kabar membahasnya.

Setiap kali pendidikan di Indonesia dikritik; entah tentang sistem pendidikannya, kurikulumnya, kualitas guru, metode mengajar, bangunan sekolah yang hampir runtuh, sampai dengan puisi pak Winarno Suraklmad beberapa saat yang lalu yang sempat membuat geram Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla. Trenyuh rasanya menyimak puisi pak Winarno. Jangankan seorang guru, seorang dosen dari universitas yang relatif cukup dikenal di Indonesia saja masih berpikir panjang untuk membeli sebuah buku guna menambah wawasan, ketajaman berpikir, memperdalam dan memperbarui ilmunya.

Surat kabar di era reformasi ini dapat diibaratkan sebagai suara masyarakat. Dengan banyak diperbincangkan persoalan pendidikan di surat kabar, dapat ditarik pernyataan, "ada sesuatu yang tidak memuaskan masyarakat dengan pendidikan di Indonesia". Apa yang sesungguhnya terjadi di dalamnya ?

Bila masyarakat banyak yang tidak puas, sementara konsep selalu datang dari atas, maka dapat diindikasikan pendidikan di Indonesia tidak demokratis. Benarkah ? Untuk menjawabnya, akan dipaparkan terlebih dahulu, bagaimana panorama pendidikan Indonesia mulai dari siswa di bangku kelas, pengambilan keputusan dalam rapat guru di sekolah hingga pengambilan keputusan di tingkat nasional.





Kocok tips, buku maling,  
ilmu pengetahuan ikut maling ...

### A.1. Di Ruang Kelas

Apakah pendidikan kita demokratis atau tidak, yang paling mudah dilihat pertama-tama adalah dalam praktik pembelajaran di kelas, apa yang terjadi dengan pembelajaran siswa dan juga sikap guru terhadap siswa. Secara umum dalam ruang kelas, masih banyak guru yang menggunakan sistem bank (*banking system*) (Freire, 1970).

Dalam model ini guru lebih dominan dan siswa lebih pasif. Guru memberi dan siswa diberi; guru menentukan dan siswa ditentukan; guru mengarahkan dan siswa diarahkan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa guru itu serba tahu dan siswa tidak tahu apa-apa. Dengan demikian siswa lebih dianggap sebagai obyek yang dibantu, dan bukan diperlakukan sebagai subyek yang dapat berkontribusi dan menentukan sendiri. Model ini sering juga disebut model *the fountain and the bowl* (Davis, 2006). Guru adalah pancuran air dan siswa adalah mangkuknya.



Guru memberikan air pengetahuan, dan siswa hanya harus menerima pengetahuan itu dalam mangkuk otaknya.

Banyak praktek pembelajaran yang dilakukan dengan guru mengajarkan semua topik dan bahan yang telah dituliskan dalam kurikulum, namun tanpa sempat menyesuaikan dengan keadaan dan situasi siswa. Akibatnya siswa memang mempelajari sesuatu, tetapi seringkali tidak menemukan makna dari materi yang dipelajari. Hal ini terjadi karena guru tidak mengajarkan bahan secara kontekstual.

Sebagai misal, guru matematika mengajarkan perhitungan tanpa mengaitkan dengan kebutuhan sehari-hari siswa yang memerlukan perhitungan; guru fisika mengajarkan banyak rumus fisika secara matematis, tanpa mengaitkan dengan situasi siswa dan kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan, siswa diberi materi pelajaran yang terlalu awal 2-4 tahun, hanya ingin agar sekolah itu dianggap unggul, agar tahun ajaran baru banyak calon siswa mendaftar ke sekolah itu.

Akibatnya lebih lanjut, pelajaran yang tidak konteks dengan siswa dengan mudah terlupakan begitu saja. Banyak anak-anak ketika ditanya ini dan itu, dengan mudah akan menjawab lupa. Beberapa ahli pendidikan mengungkapkan bahwa apabila materi pendidikan diberikan terlalu awal, justru mematikan kreativitas siswa, karena dasar-dasarnya dapat ditangkap secara tidak benar oleh siswa, sehingga akan menyulitkan pengembangannya. Dari sini tampak bahwa siswa memang menjadi obyek, bukan subyek yang diperhatikan kebutuhannya.

Topik pelajaran yang diambil dari kurikulum maupun buku pelajaran yang diajarkan pada siswa, semuanya ditentukan guru. Guru merencanakan semua isi pelajaran, cara mengajar, dan juga evaluasi pembelajaran, tanpa melihat bagaimana minat, situasi, dan kebutuhan siswa jaman sekarang. Gagasan siswa tidak disertakan dalam perencanaan pelajaran apapun. Siswa tidak dilibatkan dalam penentuan bahan yang mau didalami di kelas. Dambaan, angan-angan dan kebutuhan siswa tidak ditampung. Demikian pula ketakutan, kecemasan dan tekanan yang dialami siswa ketika harus menghadapi materi pelajaran misalnya, yang sedemikian padat melebihi orang bekerja tidak mendapatkan perhatian dan pertimbangan guru dan penyusun kurikulum. Agresivitas (baca: kenakalan), sikap *cuek* anak dan remaja sekarang bukan tidak mungkin disebabkan oleh tekanan yang luar biasa yang terjadi pada siswa, tanpa mengesampingkan penyebab lain.



Bahkan guru dapat belajar dari siswa, karena tidak jarang siswa mempunyai informasi pengetahuan lebih dulu dari guru. Hal ini banyak terjadi karena siswa mempunyai sumber informasi lain seperti internet, majalah, dan orang tua yang menjadi pakar; sedangkan banyak guru tidak mempunyai internet baik di sekolah maupun di rumahnya.

Tentu demokrasi bukan berarti bahwa guru membiarkan siswa berbuat apapun, membiarkan begitu saja proses berpikir dan kesimpulan yang diambil siswa, termasuk bila pemikiran siswa salah dan tidak rasional. Tetapi guru membantu siswa untuk mengungkapkan gagasan dan pemikirannya dan meneguhkan gagasan mereka bila benar, serta memberikan masukan dan pertanyaan kritis bila gagasan siswa tidak benar. Dengan demikian gagasan yang dibawa pulang siswa adalah gagasan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Pendidikan adalah suatu proses yang tumbuh dari dalam diri siswa. Siswa akan menjadi pandai, cerdas, dan bermoral, bila mereka sendiri mengolah dan mencerna bahan dan pengalaman hidup mereka sungguh-sungguh. Kecerdasan dan kebaikan tidak dapat diberikan begitu saja oleh guru, tetapi siswa harus menggulungnya. Karena itu sekalipun banyak diajarkan nilai-nilai moral, tetap ada saja siswa yang melakukan tindakan agresif di luar kelas. Disini diperlukan kepiawaian dan kreativitas guru untuk dapat merangsang siswa aktif untuk belajar dan berefleksi.

Guru harus dapat memberikan alternatif metode penjelasan yang lain bila suatu materi sulit dicerna oleh siswa. Hal yang akhir-akhir ini terjadi bahwa siswa tidak mampu menangkap hakekat suatu persoalan. Dari alternatif-alternatif yang diberikan sebenarnya secara tidak langsung siswa diajak untuk mengenal pokok persoalan suatu materi. Alternatif yang diberikan guru secara tidak langsung telah mengajak siswa untuk kreatif bahwa "ada banyak jalan menuju ke Roma". Proses yang relatif panjang inilah yang akan menghasilkan kualitas manusia Indonesia. Karena itu sangat penting guru memilih materi dan proses yang berkualitas. Dengan *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* diharapkan guru mempunyai waktu untuk memproses materi secara lebih berkualitas yang akan didialogkan dengan siswa.

Seandainya proses pembelajaran berlangsung secara demokratis, prosentase kelas yang seperti ini tidak banyak. Kecenderungan guru untuk tetap dominan menentukan dalam kegiatan kelas sangat tinggi; apalagi di pedesaan yang sedikit banyak masih dipengaruhi oleh budaya



feodal setempat. Meski dalam tataran nasional, banyak didengungkan model pendekatan pendidikan demokratis, namun suasana itu belum sangat dominan di lapangan.

## A. 2. Di Sekolah

Siapa yang menentukan *policy* sekolah? Apakah guru dan semua pendidik dilibatkan di dalamnya? Dari pengamatan lapangan, tampak bahwa kebanyakan *policy* sekolah ditentukan dan dibuat oleh kepala sekolah. Dominasi kepala sekolah dalam menentukan *policy* dan arah yang mau dijalankan sekolah adalah sangat besar. Memang di beberapa sekolah guru dilibatkan dalam rapat, namun kebanyakan tidak dominan dalam penentuan. Rapat guru kadang lebih untuk memberikan penguatan bahwa kepala sekolah sudah mengajak guru bicara, tetapi bukan untuk ikut menentukan *policy* bagaimana sekolah dijalankan dan diarahkan.

Tentu dapat dipahami bila kepala sekolah mempunyai gagasan sendiri yang sungguh baik dan mengembangkan pendidikan. Tetapi kadang kepala sekolah begitu dominan dan memaksakan kehendaknya kepada guru, bukan karena mempunyai ide yang sungguh cemerlang dalam mengembangkan pendidikan, tetapi karena ditekan dari atas yaitu entah dari Dinas atau dari Pengurus Yayasan atau semoga bukan ambisi pribadi yang sedang mimpi pula.

Di banyak sekolah swasta kepala sekolah tunduk kepada pengurus yayasan secara ketat. Banyak kepala sekolah ternyata tidak dapat merubah kebijakan, isi pendidikan, manajemen atau membuat perubahan yang memajukan, karena yayasan menginginkan lain. Di sekolah negeri tentu kebijakan itu sudah ditentukan dari Dinas Pendidikan, dan diatur oleh Menteri Pendidikan. Maka memang kepala sekolah sering lebih sebagai pelaksana kebijakan pendidikan nasional dalam tingkat sekolah. Banyak dari mereka lebih tidak berani mengubah apapun yang telah diputuskan dari atas. Maka yang menjadi persoalan, apakah kebijakan atau *policy* pendidikan itu sungguh ditentukan dan dipikirkan secara demokratis?

Dalam penentuan kebijakan, arah, dan apa yang mau dibuat sekolah, orang tua dan siswa jelas tidak memiliki kesempatan. Mereka lebih banyak dilibatkan dalam mencari dana dan penggalangan keuangan, namun bukan pada kebijakan dan isi pendidikan sendiri. Memang ada komisi sekolah, namun peran mereka dalam hal ini tidak



UU dan PP itu sudah lebih banyak orang dilibatkan, namun belum secara menyeluruh, terutama yang mempunyai gagasan lain dalam pendidikan. Maka tidak mengherankan bila dalam pidatonya presiden menyarankan agar diadakan pembicaraan menyeluruh tentang pendidikan nasional. Tetapi sampai hari ini kiranya belum dijalankan dengan menyeluruh.

Kita ambil contoh dengan adanya BSNP (Badan Standard Nasional Pendidikan) yang mengusulkan banyak hal tentang standarisasi pendidikan mulai dengan standar isi, kelulusan, proses, sarana, dan lain-lain, kepada menteri untuk dijadikan PP. Di satu sisi memang sudah mulai banyak melibatkan berbagai orang untuk andil dalam penentuan standar tersebut; namun di sisi lain kiranya masih belum tuntas. Penentuan standar nasional yang sangat penting bagi pendidikan nasional dilakukan agak terlalu cepat, demi mengejar batas waktu yang ditentukan dalam UU, sehingga belum secara tuntas melibatkan masukan masyarakat yang lebih luas.

Memang tidak semua orang harus diajak membicarakan, itu pasti tidak mungkin ! Namun hasil pembicaraan mereka sebelum menjadi peraturan, kiranya perlu dipublikasikan secara umum, untuk mendapatkan banyak tanggapan masyarakat (*public hearing*). Bila suatu kebijakan juga memperhatikan, menampung dan memuat pendapat masyarakat, dapat dipastikan kebijakan yang dibuat akan dapat bertahan lama, dan bukannya ganti pejabat ganti kebijakan. Sebagai produk nasional, kebijakan yang menangani pendidikan generasi muda bangsa, kiranya tidak perlu terburu-buru diputuskan, tetapi harus dikerjakan secara teliti dan mendalam, sehingga hasilnya lebih matang dan memuaskan semakin banyak orang.

## **B. SISTEM PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS**

Kalau kita bicara soal sistem pendidikan yang demokratis, sebenarnya kita mau bicara apa? Konsep demokrasi seperti apa yang kita inginkan? Disini pun kiranya banyak orang dapat tidak sama pendapatnya dan dapat saling berseberangan. Untuk itulah dalam tulisan ini ingin dibatasi pengertian sistem pendidikan demokratis.

Dengan *demokratis* kami maksudkan bahwa ada partisipasi luas dari para anggota yang terlibat (*stakeholder*) terhadap sesuatu masalah atau keputusan yang mau diambil. Setiap anggota mempunyai



kebebasan untuk memberikan masukan, gagasan, tanggapan kritis, demi semakin baiknya keputusan yang diambil. Maka ada unsur *kebebasan* dan *partisipasi*. Sistem ini dilawankan dengan sistem yang otoriter, yaitu penentu keputusan adalah pihak atasan atau yang berkuasa; sehingga tidak ada kebebasan berpartisipasi dari para anggota. Anggota dalam sistem ini hanya dijadikan pelaksana keputusan.

Bila pengertian demokratis yang sederhana di atas diterapkan pada sistem pendidikan, maka sistem pendidikan disebut demokratis bila didalamnya ada kebebasan berpartisipasi dari seluruh warga pendidikan. Secara sederhana itu berarti dalam pendidikan terjadi beberapa hal berikut:

- Tujuan, arah, visi, isi, dan kebijakan pendidikan ditentukan bersama oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat pendidikan. Hal-hal tersebut tidak ditentukan oleh sekelompok orang saja atau oleh pimpinan; tetapi oleh sebanyak mungkin elemen masyarakat. Oleh karena tidak semua anggota masyarakat mengerti hakekat pendidikan secara baik, tentu saja dalam praktek penentuannya dilakukan oleh mereka yang mengerti pendidikan dan juga oleh wakil-wakil masyarakat. Dalam lingkup kecil di unit sekolah, jelas guru, orang tua, wakil siswa, kepala sekolah, dan yayasan ikut serta dalam penentuannya secara bersama. Proses penentuannya juga dilakukan secara demokratis. Artinya semua pihak diberi kesempatan memberikan masukan dan gagasan kritis. Oleh karena tidak semua pihak mampu mengungkapkan gagasan di depan umum, maka mereka dapat diberi kesempatan mengungkapkan gagasan lewat tulisan. Suasana saling mendengarkan, saling mencari yang terbaik bagi pendidikan perlu dijaga. Dengan demikian akan semakin banyak masukan untuk memperbaiki keputusan yang ada.
- Dalam pendidikan, siswa adalah subyek yang terpenting, yang perlu dibantu untuk berkembang. Maka kebutuhan, keprihatinan, keinginan, situasi dan keadaan siswa menjadi prioritas. Untuk itu sistem pembelajaran adalah berpusat pada siswa, dan bukan pada guru. Siswalah yang menjadi subyek dalam pembelajaran, yang harus aktif mengembangkan diri, dan guru lebih sebagai pembantu. Maka bukan model *banking system* yang berjalan. Siswa harus dilibatkan dalam penentuan bahan yang ingin didalami. Siswa perlu



dibantu untuk memahami dunia mereka yang akan datang, yang pasti lain dengan dunia yang sekarang dihadapi guru mereka. Tentu semuanya sesuai dengan tingkat dan kemampuan siswa.

- Kurikulum bersifat demokratis, ada ruang kebebasan siswa untuk berkembang; dan ditentukan dengan melihat kebutuhan, situasi, dan juga konteks siswa.
- Manajemen sekolah ditentukan dari bawah, bukan dari atas. Maka guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar dilibatkan dalam manajemen sekolah.
- Birokrasi hendaknya menjadi lebih pendek karena ada otonomi dalam tingkat lokal sehingga pusat lebih berperan mengurus yang pokok-pokok saja. Birokrasi lancar dan sungguh demi melayani proses pendidikan agar menjadi lebih cepat dan maju.

### **C. DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN INDONESIA**

Bicara soal sistem pendidikan yang demokratis yang paling dasar sebenarnya adalah melihat semangat demokrasi di dalam kelas, saat guru dan siswa berhadapan. Hal ini sangat penting karena inilah sebenarnya praktek pendidikan yang sungguh-sungguh, dan semua nilai-nilai pendidikan dipraktekkan. Sedangkan *policy* dan aturan main (UU, PP) semuanya lebih pada aturan tertulis yang belum pasti akan dilakukan di lapangan. Maka tulisan ini justru akan menyoroti mulai dari praktek pendidikan di bawah. Apakah guru-guru memang demokratis, apakah kepala sekolah demokratis, apakah dinas dan yayasan demokratis? Apakah siswa mengalami semangat itu dalam kelasnya?

#### **C.1. Kebebasan Berpikir Siswa dan Guru**

Tujuan utama pendidikan adalah membantu siswa untuk berkembang menjadi manusia dewasa yang lebih utuh, dan akhirnya dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis. Agar siswa dapat sungguh terbantu berkembang, hanya mungkin bila dia sendiri aktif mengembangkan diri. Hal ini hanya terjadi bila suasana kelas dan sekolah memberikan kebebasan kepada siswa untuk aktif berkembang.

Dunia yang akan dihadapi siswa nanti adalah dunia lain yang berbeda dengan yang sekarang dihadapi guru, dan sangat berbeda



dengan dunia yang dihadapi oleh para ahli yang menemukan banyak bahan pelajaran. Pendidikan kiranya dimaksudkan agar siswa nantinya dapat menghadapi dunianya yang berbeda dengan dunia para guru. Maka dalam pendidikan demokratis, perlulah ada ruang dimana keinginan, dambaan, keprihatinan, dan cita-cita serta impian siswa akan masa depan diberi tempat.

Itulah sebabnya tidak mungkin guru hanya mengajarkan bahan yang sudah kuno, yang sudah lama; yang mungkin tidak ada gunanya lagi bagi dunia siswa di masa depan. Einstein mengatakan, "*Kita tidak dapat memecahkan persoalan sekarang dengan pemikiran kemarin*" (dalam Davis, 2006). Artinya, kita tidak dapat memecahkan persoalan mendatang yang akan dihadapi siswa dengan rumus atau pemikiran yang diberikan guru sekarang ini. Pemikiran itu akan menjadi kuno ketika siswa harus menghadapi persoalan di dunia mendatang. Maka tantangan bagi guru masa sekarang ini, adalah menjadi terbuka pada tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan keterbukaan itu, guru diharapkan dapat membantu siswa terbuka terhadap dunianya yang pasti akan berbeda dengan dunia para gurunya.

Tantangan masa depan yang sudah dapat diraba adalah tersebarnya jaringan informasi yang begitu besar lewat *website* dan tidak terbandung lagi. Informasi itu ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang berguna dan ada yang tidak. Orang dapat tenggelam dalam luapan informasi itu, bila tidak kritis. Dunia masa depan juga diwarnai dengan ketidakjelasan. Banyak hal terjadi yang diluar pemikiran fisik, mekanistik, yang dulu dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Dunia mendatang penuh dengan *chaos*, ketidakjelasan, dan banyak hal terjadi yang sepertinya tidak masuk akal. Dunia lebih diwarnai model sistem biologi, dengan ketidaktepatan dan ketidakpastian disana-sini.

Dunia global! mendatang juga diwarnai dengan pasar bebas. Ini berarti bahwa hanya produk yang baik akan menang dalam pasar dunia, sedangkan yang jelek akan hancur. Industri yang besar akan bersaing, tetapi yang kecil dan tidak bermutu akan gulung tikar. Demikian juga dalam dunia pendidikan, hanya yang unggul akan bertahan. Maka lapangan kerja akan semakin sempit bagi orang Indonesia, bila mereka tidak berkualitas tinggi. Semua ini menjadi persoalan yang akan dihadapi siswa kita. Inilah dunia mereka nanti. Dan bila tidak hati-hati mengambil sikap, akan terjadi kehancuran berbagai kelompok orang karena kalah dalam pertarungan pasar bebas.



Yang juga tidak kalah penting diperhatikan adalah bahwa dunia mendatang ini lebih dimengerti secara holistik. Orang berpikir lebih secara menyeluruh dalam menghadapi berbagai soal karena semua hal saling berkaitan. Misalnya, dalam memecahkan persoalan korupsi, tidak dapat diselesaikan hanya dengan melibat kelompok yang korupsi, tetapi harus dilihat dari berbagai segi dan aspek. Bila tidak, maka persoalan akan tetap berjalan biasa, bahkan menjadi lebih kompleks.

Jelas pemikiran lama yang mekanistik, yang linear, tidak akan mampu menghadapi persoalan yang pelik di masa depan. Dunia lebih diwarnai oleh pendekatan biologis, daripada yang fisik mekanistik. Itu berarti ada banyak ruang yang tidak pasti, yang lebih berdasarkan probabilitas saja.

Proses belajar masa depan tidak lagi bersifat *conventional speed*, melainkan *twitch speed*, tidak lagi *step by step* melainkan *random access* (tidak harus urut, tetapi dapat melompat, mana yang penting dan karena itu menarik, atau mana yang "menarik", karena itu penting); bukan lagi *linear processing* melainkan *parallel processing* (dapat berjalan dengan disiplin dan aspek yang lain); tidak lagi *text first*, melainkan *field first* (tidak harus teori dulu, tetapi dapat langsung pengamatan pada lapangan); tidak lagi ceramah melainkan bermain (peragaan, simulasi). Bahkan tahap-tahap pembelajaran dapat: tahap pengamatan lapangan (semacam *brainstorming*), peniruan (mimisis, memilih yang dirasa baik, menarik), kreativitas (pengembangan), dan teori. Dari proses ini seringkali diperoleh pengalaman dan temuan baru: Wow, I got it ..... My think is leaping... Archimides mengatakan: Eureka... !!

Maka penting siswa disiapkan akan ketidujelasan dan tantangan dunia mendatang itu. Karena itu beberapa sikap perlu dikembangkan oleh para siswa. *Pertama*, mengembangkan cara berpikir kritis, analitis, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak jelas. *Yang kedua*, sikap terbuka terhadap kemungkinan yang tidak dapat diramalkan dan dipersiapkan sebelumnya. Inilah sikap keterbukaan pada dunia yang tak teramalkan lagi. Dibutuhkan model berpikir alternatif, yang dapat melihat berbagai dimensi dari berbagai sudut. *Ketiga*, diperlukan cara pendekatan yang holistik dan integral

Jangan sampai anak  
mengejelajahi semua hal,  
yang sebenarnya tidak  
ada gunanya dalam  
hidupnya.....



dalam menghadapi banyak hal. Tidak mungkin persoalan hidup dan dunia yang makin kompleks ini didekati hanya dari satu segi, tetapi perlu melihat secara keseluruhan dan semua hal yang terkait. *Keempat*, diperlukan daya juang yang tinggi. Persoalan masa depan tidak dapat dihadapi dengan seenaknya atau malas-malasan, tetapi memerlukan daya juang yang tinggi. Memerlukan keberanian untuk menatapnya. Dan tentu disitu diharapkan adanya harapan akan masa depan. Di balik ketidakjelasan itu, masih ada harapan bagi mereka.

Apakah sikap dan keterampilan tersebut dapat dilatihkan juga sekarang ? Materi, model pembelajaran dan keahlian apa yang perlu dilatihkan ? Inilah tantangan berat bagi guru jaman ini yang peka terhadap persoalan dunia siswa mendatang.

Untuk itulah dibutuhkan guru yang demokratis, yang memberikan banyak peluang dan waktu bagi siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan juga berpikir khaostis. Maka penting dalam sekolah, diberi kesempatan yang luas bagi siswa untuk belajar menentukan hidup, pikiran, dan pergulatannya. Untuk itu harus ada keterbukaan dalam kurikulum, dalam bahan, dalam model pembelajaran, dalam pengelolaan klas, dan bahkan dalam relasi guru dan siswa. Jangan sampai anak mempelajari semua hal, yang setelahnya tidak ada gunanya dalam hidupnya. Perlulah pendidikan yang kontekstual, yang memikirkan masa depan seperti apa yang dibutuhkan manusia yang akan datang ? Dan ini tidak dapat ditentukan oleh guru sendiri, tetapi oleh siswa, orang tua, dan juga ahli yang ada.

Dibutuhkan pendidikan yang kontekstual yang memikirkan kebutuhan siswa di masa yang akan datang..... Cukup banyak pengurus yayasan dan kepala sekolah yang memang tidak terbuka terhadap tantangan jaman mendatang ..... masa depan siswa akan lain dengan dunia yang mereka hadapi sekarang.

Pendidikan sekarang membutuhkan guru demokratis yang memberikan peran besar siswa untuk partisipasi dan memberikan kebebasan untuk merencanakan sesuatu pilihan bagi hidupnya mendatang. Guru yang otoriter, yang hanya mengajarkan bahan yang tidak mengerti persoalan

mendatang di jaman yang tidak jelas ini, akan sulit membantu siswa. Jaman ini dibutuhkan guru yang dapat menyertai siswa mencari



bersama apa yang kiranya diperlukan di masa depan bagi hidup mereka. Pendidikan jaman ini membutuhkan guru yang punya hati, yang punya kepekaan terhadap apa yang dihadapi siswa.

Maka sangat penting bahwa pergulatan siswa akan hari depan, akan dunia masa depan, diberi ruang dalam proses pembelajaran. Bagaimana siswa khawatir akan masa depan, bagaimana mereka berpikir akan hidupnya dimasa mendatang, bagaimana impian mereka tentang dunia mendatang; semua perlu diberi ruang untuk dapat diungkapkan, dicerna, dan dikritisi. Kepekaan guru disini diharapkan.

### C.2. Kepala Sekolah, Dinas, dan Yayasan

Guru demokratis tidak mungkin berkembang bila kepala sekolah, pengurus yayasan sekolah, atau dinas pendidikan tidak demokratis. Bagaimana mungkin guru memberikan kebebasan siswa untuk menangkap persoalan masa depan, bila kepala sekolah hanya berpikir tentang jumlah kelulusan atau topik yang harus diselesaikan? Bagaimana kepala sekolah dapat memberikan kebebasan kepada guru, bila pengurus yayasan selalu berpikir tentang laporan guru dan jumlah uang yang harus dimasukkan? Jelas itu semua tidak akan jalan.

Suasana demokratis seperti itu membutuhkan kepala sekolah, pengurus yayasan, dan dinas pendidikan yang demokratis. Maka kepala sekolah, yayasan, dan dinas secara bersama-sama harus mengembangkan diri dengan melihat kebutuhan masa depan yang tidak jelas, sehingga mereka dapat berpikir tentang kebutuhan siswa di masa depan.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, kiranya diperlukan kerjasama yang baik dan terbuka antara guru, kepala sekolah, yayasan, dan dinas. Mereka perlu duduk bersama, dimana masing-masing dapat mengungkapkan apa yang mau dibantu kepada siswa mereka dalam menghadapi persoalan masa depan. Dari pengalaman di lapangan hal ini tidak mudah. Cukup banyak pengurus yayasan dan kepala sekolah yang memang tidak terbuka terhadap tantangan jaman mendatang; bahkan tidak tahu bahwa masa depan siswa mereka akan lain dengan dunia yang mereka hadapi sekarang. Banyak kepala sekolah yang terlalu dibebani oleh manajemen praktis, sehingga tidak melihat tantangan masa depan. Banyak dari mereka lebih sibuk dengan menjalankan aturan main, tanpa mau mengembangkan akan kemana



pendidikan ini berlari. Nampaknya diperlukan waktu khusus bagi mereka untuk mengembangkan diri.

Kendala dengan para pengurus yayasan adalah bahwa banyak dari mereka memang sibuk, dan tidak punya banyak waktu untuk mengembangkan pemikirannya tentang persoalan dunia yang lebih kompleks. Bahkan banyak yang tidak tahu peraturan pendidikan yang ada, sehingga mudah dibingungkan dengan peraturan yang baru. Bagi pendidikan negeri, persoalan yang kiranya mendalam disini adalah persoalan struktur birokrasi. Beberapa hambatan itu misalnya, aturan birokrasi yang sangat ketat, tuntutan loyalitas bawahan terhadap pimpinan yang cukup tinggi dan situasi masyarakat yang masih feodal. Dalam sistem feodal pembicaraan yang bebas dan demokratis antara guru, kepala sekolah, dan dinas, tidak akan pernah terjadi.

Tentu menjadi persolan bagi kita, apakah memang untuk Indonesia, demokrasi yang mutlak diperlukan? Jangan-jangan untuk kemajuan di Indonesia, justru dibutuhkan suasana demokrasi yang tidak absolut. Yang jelas dalam dunia politik saat ini, suasana demokrasi kita belum mapan. Demokrasi sering diartikan sebagai asal bicara dan menang sendiri bagi kelompoknya. Bila demokrasi diartikan seperti itu, maka memang dalam dunia pendidikan kiranya tidak diperlukan. Dalam dunia pendidikan yang diperlukan adalah demokrasi demi mencari yang terbaik bagi kesemuanya. Maka diperlukan juga keberanian menerima gagasan orang lain, berani menomorduakan gagasannya sendiri bila ternyata memang tidak tepat. Demokrasi seperti inilah yang diperlukan dalam dunia pendidikan.

Demokrasi sering diartikan sebagai asal bicara dan menang sendiri bagi kelompoknya..... Bila demokrasi diartikan seperti itu, maka memang demokrasi dalam dunia pendidikan kiranya tidak diperlukan.

Persoalan yang muncul akhir-akhir ini adalah pertentangan antara kepala sekolah dengan yayasan sekolah. Mereka sering tidak dapat duduk bersama dan bicara bersama demi baiknya pendidikan bagi siswa. Atau kedua pihak ini terjadi saling melakukan subordinasi, atau yang tampak feodal, pihak yang satu merasa lebih tahu dan lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain. Sebaliknya pihak yang lain merasa inferior.



Kiranya mereka perlu sadar bahwa mereka mempunyai tugas yang sama, yaitu membantu siswa agar menjadi manusia yang berkembang. Tugas mereka adalah sama yaitu menjalankan dan mengembangkan pendidikan. Maka kepentingan diri sendiri dan juga semangat mencari menang sendiri tidak tepat lagi. Yang seharusnya menjadi pusat perhatian adalah bahwa siswa dibantu untuk maju.

### C.3. Kurikulum

Apakah dalam kurikulum kita ada tempat bagi demokrasi pendidikan ? Kita sedang merubah kurikulum dari KBK menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam kurikulum ini oleh BSNP ditentukan standar kelulusan, isi, proses, sarana, dan lain-lain. Yang menarik adalah dalam standar isi dicoba dibatasi banyaknya bahan dan waktu belajar di sekolah karena dianggap terlalu tinggi. Maksud dari pengurangan ini adalah agar guru menjadi bebas untuk mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan konteks, situasi, kebutuhan, dan keadaan siswa dan sekolah.

Yang menjadi persoalan adalah apakah memang para guru akan mampu untuk mengembangkan hal itu ?

Dalam pengertian ini, maka sebenarnya ada peluang bagi guru, untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan keadaan siswa. Bahkan guru dapat membantu memberikan

peluang bagi siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran dan mempersiapkan masa depan. Yang menjadi persoalan adalah apakah memang para guru akan mampu untuk mengembangkan hal itu ? Bila tidak, nantinya malah mutu pendidikan akan turun karena isi telah dikurangi dan guru tidak dapat menggali lebih dalam. Barangkali memang guru perlu dibantu agar mereka dapat sungguh kreatif mengembangkan kurikulum tingkat sekolah mereka.

Oleh karena kurikulum nasional hanya akan lebih memberikan kerangka dan garis besar *policy* sebagai acuan pendidikan, sebenarnya nampak jelas bahwa ada tempat bagi siswa untuk sungguh aktif dalam pendidikan, karena peluangnya ada. Yang menjadi soal adalah apakah guru memberikan peluang itu dan membantu siswa menggunakan peluang itu untuk semakin maju ?



Banyak guru takut memberikan peluang kepada siswa karena khawatir siswa tidak dapat menggunakan waktunya dengan baik. Dan ini memang sudah terjadi. Bila jam pelajaran kosong banyak siswa dengan enak lalu pergi dan asal main saja. Karena itu persiapan pembelajaran haruslah profesional. Berdasarkan materi yang ada, guru dapat membantu siswa untuk berpikir tentang keinginan, dambaan, dan panggilan hidup mereka di masa depan.

Dengan melihat bakat, kemampuan, inteligensi masing-masing siswa, siswa dibantu untuk mengembangkan keterampilan dan juga keunggulan ilmiah yang sesuai dengan dambaan, seperti kemampuan menulis jurnalistik, kemampuan analisis, mengembangkan penelitian sains dan lingkungan, mengembangkan seni, drama, dan lain-lain. Dan tidak kalah penting adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam mengekspresikan gagasan mereka baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing; baik lisan maupun tertulis. Jelas hal-hal ini akan membantu masa depan mereka lebih baik.

#### **C.4. Birokrasi Pendidikan, Sentralisasi, dan Otonomi**

Jaman ini ditandai dengan peralatan komputer yang canggih yang memudahkan orang merancang suatu sistem penanganan urusan pendidikan secara lebih sederhana, cepat, dan tepat. Maka sebenarnya birokrasi di dunia pendidikan seharusnya dapat dibuat lebih sederhana, cepat, dan tepat pula. Namun dalam kenyataan tidak demikian. Birokrasi dalam dunia pendidikan masih sangat lamban, panjang, lama, dan akhirnya menghabiskan dana besar. Banyak urusan harus melalui berbagai langkah, sehingga memakan waktu lama.

Dalam konteks demokrasi, kiranya perlu dilihat persoalan otonomi daerah dan juga sentralisasi dalam dunia pendidikan. Demokrasi dalam dunia pendidikan, jelas tidak dapat membebaskan adanya otonomi daerah secara mutlak. Mengapa demikian, karena kekuatan daerah dalam hal dana dan sumber daya manusianya tidak sama. Bila diberi kebebasan otonomi penuh, maka daerah yang miskin dana dan lemah sumber daya manusianya, akan semakin tertinggal kondisi pendidikannya; sedangkan daerah yang kuat dana dan sumber daya manusianya, akan cepat maju kondisi pendidikannya. Maka diperlukan keseimbangan antara otonomi dan sentralisasi. Daerah yang miskin dana, minim tenaga dan lemah sumber daya manusianya perlu dibantu dari pusat, sehingga pendidikan di daerah yang lemah dapat



mengalami kemajuan yang layak; sedangkan daerah yang memang kuat, supaya diberi otonomi lebih, sehingga mereka semakin maju dengan cepat tanpa banyak hambatan. Keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi ini sangat diperlukan, selain karena diperlukan pemerataan juga mengingat standarisasi nasional pendidikan, khususnya tentang mutu pendidikan yang antara lain diukur dengan Ujian Nasional.

Jeritan masyarakat yang mengatakan sekolah mahal dalam sistem demokrasi harus dikritisi bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat tidak mampu. Otonomi yang 'kebablasan' berakibat sebagian pendidikan sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri tertentu, dengan alasan berbadan hukum pemerintah, memasang tarif semaksimal mungkin, bahkan berlebih. Padahal mereka pada masa Orde Baru dibesarkan dengan uang rakyat.

Demokrasi yang menuntut kebebasan berpartisipasi setiap anggotanya, jelas tidak dapat jalan, bila tingkat kemampuan anggota tidak sama. Maka agar setiap anggota dapat berpartisipasi, anggota yang lemah perlu dibantu terlebih dahulu.

Mereka perlu diberdayakan sehingga akhirnya mereka mampu terlibat dalam partisipasi. Inilah pentingnya pemerintah pusat memperhatikan daerah-daerah yang belum maju dan sulit maju. Dalam konteks sekolah, secara konkrit ini berarti perlu dibedakan antara sekolah yang sudah maju dan yang belum maju. Sekolah-sekolah, entah negeri atau swasta, yang sudah maju dan dapat mengelola dan mengembangkan sendiri perlu diberi kebebasan untuk berkembang dan menggunakan sistemnya.

agar setiap anggota dapat berpartisipasi, anggota yang lemah perlu dibantu terlebih dahulu.....

Mereka tidak perlu dibebani berbagai macam aturan yang malah akan menghambat perkembangannya. Mereka perlu diberi otonomi. Yang penting standard minimal yang ditentukan pemerintah tercapai. Sedangkan sekolah yang masih lemah dan belum maju perlu dibantu pemerintah agar dapat tetap berkembang memenuhi batas yang ada.

Dalam konteks birokrasi, kadang-kadang ada kesan orang yang dahulu kritis dalam pendidikan, setelah menjadi birokrat menjadi lemah



dan tidak ada usulan apa-apa lagi. Mereka sepertinya mati, tidak punya pikiran kritis lagi. Tentu ini dapat dimengerti, karena beberapa alasan.

Nampaknya dibutuhkan gerakan mengubah mesin birokrasi itu sendiri, bahkan berlaku juga untuk departemen yang lain.....

**Pertama**, mereka melihat persoalan pendidikan di Indonesia yang terlalu kompleks dan berat. **Kedua**, mereka harus menangani persoalan itu dan bukan mengkritis lagi, maka mereka tidak berkomentar lagi. Mereka harus mencoba memecahkan persoalannya.

**Ketiga**, ada juga orang-orang kantor yang sudah lama bekerja di departemen pendidikan, baik rekan kerja yang bersifat horizontal maupun vertikal. Merekalah yang sering disebut mesin birokrasi, yang mengerjakan semuanya. Bila mesin birokrasi itu tidak dapat mengikuti perubahan, maka dapat terjadi, meski seorang menteri pendidikan sangat modern dan banyak ide, pembaruan dan perubahan tidak berjalan karena mesin birokrasi itu tidak mau mengerjakannya.

Nampaknya dibutuhkan gerakan mengubah mesin birokrasi itu sendiri, bahkan berlaku juga untuk departemen yang lain. Dan ini tidak mudah karena cara kerja mereka sudah menjadi tradisi yang kental. Bahkan juga bila peralatan komputer dan sistemnya canggih pun, belum pasti ada perubahan yang signifikan. Nampaknya diperlukan perubahan yang lebih menyeluruh dan mendasar disini. Tentu, kita tidak menutup mata bahwa akhir-akhir ini ada beberapa perubahan yang lumayan seperti dalam urusan akreditasi, hibah bersaing, yang relatif agak cepat.

#### **C.5. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Aturan.**

Kita semua tahu bahwa UU, PP, dan juga aturan lokal pendidikan cukup banyak yang memang ditentukan secara kurang demokratis. Meski UU pendidikan dibicarakan panjang lebar, dan divoting di DPR, tidak berarti sudah demokratis. Apalagi kalau kita cermati isi didalamnya masih nampak proses pendidikan yang kurang demokratis. Masih banyak hal dalam proses pendidikan ditentukan oleh pemerintah, sehingga sekolah kurang bebas mengembangkan diri.



dan tidak ada usulan apa-apa lagi. Mereka sepertinya mati, tidak punya pikiran kritis lagi. Tentu ini dapat dimengerti, karena beberapa alasan.

Nampaknya dibutuhkan gerakan mengubah mesin birokrasi itu sendiri, bahkan berlaku juga untuk departemen yang lain.....

**Pertama**, mereka melihat persoalan pendidikan di Indonesia yang terlalu kompleks dan berat. **Kedua**, mereka harus menangani persoalan itu dan bukan mengkritisi lagi, maka mereka tidak berkomentar lagi. Mereka harus mencoba memecahkan persoalannya.

**Ketiga**, ada juga orang-orang kantor yang sudah lama bekerja di departemen pendidikan, baik rekan kerja yang bersifat horizontal maupun vertikal. Merekalah yang sering disebut mesin birokrasi, yang mengerjakan semuanya. Bila mesin birokrasi itu tidak dapat mengikuti perubahan, maka dapat terjadi, meski seorang menteri pendidikan sangat modern dan banyak ide, pembaruan dan perubahan tidak berjalan karena mesin birokrasi itu tidak mau mengerjakannya.

Nampaknya dibutuhkan gerakan mengubah mesin birokrasi itu sendiri, bahkan berlaku juga untuk departemen yang lain. Dan ini tidak mudah karena cara kerja mereka sudah menjadi tradisi yang kental. Bahkan juga bila peralatan komputer dan sistemnya canggih pun, belum pasti ada perubahan yang signifikan. Nampaknya diperlukan perubahan yang lebih menyeluruh dan mendasar disini. Tentu, kita tidak menutup mata bahwa akhir-akhir ini ada beberapa perubahan yang lumayan seperti dalam urusan akreditasi, hibah bersaing, yang relatif agak cepat.

#### **C.5. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Aturan.**

Kita semua tahu bahwa UU, PP, dan juga aturan lokal pendidikan cukup banyak yang memang ditentukan secara kurang demokratis. Meski UU pendidikan dibicarakan panjang lebar, dan divoting di DPR, tidak berarti sudah demokratis. Apalagi kalau kita cermati isi didalamnya masih nampak proses pendidikan yang kurang demokratis. Masih banyak hal dalam proses pendidikan ditentukan oleh pemerintah, sehingga sekolah kurang bebas mengembangkan diri.



Namun UU itu sudah ada dan peraturan pemerintah itu juga ada. Lalu bagaimana agar dapat lebih baik? Disinilah kiranya perlu berbagai masukan dan pemikiran. Nampaknya perlu dipikirkan proses penyempurnaan dalam perjalanan. Dari pihak pemerintah perlu terbuka terhadap praktek yang ada. Bila dalam praktek memang terjadi soal yang tidak demokratis, dan memberatkan suatu pihak, perlu ada forum untuk dapat membicarakan bersama lagi. UU dan PP yang dalam prakteknya tidak mempercepat perkembangan pendidikan, tetapi malah memperlambat, kiranya perlu disempurnakan. Dengan demikian UU dan PP tidak menjadi tonggak mati yang inematikan.

### C.6. Demokrasi Pendidikan di Perguruan Tinggi

Lain dengan sekolah dasar dan menengah, pendidikan di perguruan tinggi (PT) dirasakan lebih demokratis. Salah satu alasan kiranya karena bisnis pendidikan di PT adalah pengetahuan, dan para pelaksana serta peserta pendidikan dianggap lebih dewasa. Mereka dapat dan berani untuk bicara dan membicarakan. Bahkan *policy* yang tidak baik dan merugikan mahasiswa dengan mudah akan didemo oleh mahasiswa.

Meski demikian kita tidak menutup mata bahwa masih terjadi praktek pendidikan di PT yang tidak demokratis. Akhir-akhir ini kita lihat bagaimana banyak konflik antara yayasan dan rektorat yang akibatnya mengganggu proses pendidikan mahasiswa. Beberapa konflik antara universitas dengan mahasiswa dalam persoalan kenaikan uang kuliah, dalam penentuan beberapa kebijakan, menunjukkan bahwa model pemecahan persoalan di PT masih belum demokratis. Mereka kadang lebih suka mencari menang sendiri, tidak membuka diri untuk duduk bersama dan membicarakan dengan baik keputusan yang mau diambil.

Sebagai insan pendidikan tinggi yang rasional, diharapkan mereka dapat memberikan teladan berdiskusi secara rasional pula. Bila hal ini terjadi, maka demo yang sampai merusak dan menghancurkan gedung kuliah tidak perlu terjadi; apalagi peristiwa pemukulan civitas akademi tentu menjadi hal yang, terlarang. Nampaknya masih diperlukan waktu untuk belajar berbicara secara rasional dan bertindak secara rasional.

Sekarang ini banyak PT dikelola oleh BHP dengan wali amanahnya. Diharapkan dengan model ini, banyak pihak dapat ikut



memikirkan jalannya perguruan tinggi. Yang jelas dari konsepnya, akan semakin banyak pihak dilibatkan. Harapannya dapat terjadi pengelolaan perguruan tinggi yang lebih demokratis. Kalau tidak, maka model ini pun akhirnya akan menjadikan perguruan tinggi macet, karena di antara anggota wali amanah sulit untuk berbicara secara rasional dalam memikirkan arah perguruan tingginya. Semoga ini tidak terjadi.

#### **D. IMPIAN MASA DEPAN**

Proses pendidikan demokratis di Indonesia masih panjang dan menghadapi banyak persoalan. Menurut kami, persoalan itu akan terus ada. Yang kiranya dapat diimpikan untuk mempercepat proses demokrasi itu adalah:

- a. Pemerintah memberikan kebebasan kepada sekolah yang sudah baik untuk menentukan visi, arah, isi, dan *policy* dari pendidikan yang ada. Biarlah mereka berkembang sendiri dengan baik dan cepat, tidak dibatasi dengan peraturan-peraturan yang kecil yang justru menghambat. Berilah mereka kebebasan untuk mengembangkan diri.
- b. Sekolah yang memang kecil dan belum mampu, perlu dibantu oleh pemerintah agar semakin cepat maju. Hal ini terutama sekolah di daerah terpencil, miskin, dan tidak banyak sarana dan tenaga yang kompeten.
- c. Pemerintah kiranya hanya perlu memberikan tonggak-tonggak yang perlu dicapai secara nasional. Maka memang benar bila BSNP hanya menunjukkan yang penting saja; menunjukkan standar minimal saja; biarlah yang lain ditentukan oleh unit sekolah masing-masing.
- d. Keseimbangan antara otonomi daerah dan sentralisasi dalam pendidikan, terlebih dalam pendidikan dasar dan menengah perlu dijaga. Sekolah yang sudah kuat diberi kebebasan untuk maju makin pesat, dan sekolah yang lemah dibantu untuk mengatasi kesulitannya.
- e. Guru adalah kunci dalam pendidikan demokratis di dalam kelas. Mereka perlu ditingkatkan kesadarannya akan pendidikan demokratis, lebih terbuka terhadap dunia masa depan siswa, dan berani memberikan peluang dan kebebasan siswa untuk aktif mengembangkan diri mereka dan terlebih menghadapi dunia mereka.



- f. Siswa diberi peluang untuk berpikir kritis, analitis, integral, dan holistik di sekolah. Mereka dibantu untuk bersikap terbuka dan mempunyai daya tahan yang besar dalam menghadapi dunia mendatang mereka. Mereka perlu diberi peluang untuk mengungkapkan secara jujur keprihatinan, ketakutan, kegelisahan, kepedulian, dan juga idaman mereka akan dunia mereka yang tidak jelas.



## BAB 2 PERAN PUBLIK DAN PEMERINTAH DALAM MEMENUHI HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN

Anita Lie, Ed.D.  
*Universitas Widya Mandala, Surabaya*  
*Anggota Kehormatan PUSHAM UBAYA*  
*Anggota Komunitas Indonesia untuk Demokrasi*

*- Kemiskinan adalah musuh nomor satu manusia.  
Satu kemiskinan dapat menyebabkan sejuta bahaya (Henrik Ibsen) -*

### A. PERMASALAHAN PENDIDIKAN PADA TINGKAT PERMUKAAN

Berita mengenai ambruknya bangunan sekolah dan anak putus sekolah di berbagai media massa semakin memprihatinkan. Fakta ini hanya salah satu dari sekian banyak permasalahan yang menghantui dunia pendidikan anak-anak kita. Potret kemiskinan di bidang pendidikan di Indonesia menjadi semakin buram dengan pemberitaan mengenai pemotongan dan penyelewengan dana-dana pendidikan untuk kepentingan pribadi maupun politis golongan tertentu.

Kita juga terperangah ketika membaca mengenai hasil uji kompetensi guru yang menunjukkan bahwa ternyata lebih dari separuh guru yang diuji ternyata mempunyai tingkat kompetensi di bawah siswa. Pada sisi yang lain, sebagian besar masyarakat juga bersikap tidak peduli dan kurang menyadari peran mereka dalam upaya memajukan pendidikan anak-anak bangsa. Berbagai permasalahan pada tingkat permukaan ini dapat dikategorikan menjadi lima macam: 1) kemiskinan, 2) kelangkaan manusia yang berkualitas dalam bidang pendidikan, 3) ketertinggalan dari pengetahuan, 4) kelemahan organisasi pendidikan, dan 5) kekurangan kesadaran masyarakat.

Kemiskinan masih menjadi salah satu fakta nyata dalam masyarakat Indonesia. Mengacu pada pasal 31 Amandemen UUD 1945 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003, dan kesepakatan dalam Konvensi Internasional Bidang Pendidikan di Dakar tahun 2000, masyarakat dijanjikan bahwa



pendidikan dasar akan gratis. Padahal kenyataannya, siswa masih dikenai berbagai pungutan baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Bahkan ditengarai, Komite Sekolah yang mestinya berfungsi untuk menjadi lembaga pengontrol sekolah malah memberikan justifikasi bagi berbagai pungutan yang diadakan sekolah (*Kompas*, 2 Agustus 2004).

Program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) 2005 dan program BOS diharapkan bisa menggratiskan sekolah dasar bagi anak-anak Indonesia. Padahal pemberian subsidi biaya oleh pemerintah tidak serta merta menggratiskan pendidikan bagi warga. Di sekolah-sekolah yang membiayai penyelenggaraan pendidikan lebih dari Rp. 20.000,- per siswa per bulan di jenjang sekolah dasar, ada kemungkinan besar orang tua atau wali murid harus menanggung kekurangan biaya. Dengan bantuan sekitar Rp. 20.000,- per siswa per bulan, jika ada 30 siswa per kelas (salah satu prasyarat bagi terciptanya suasana belajar yang kondusif untuk pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan kompetensi), dana yang tersedia (Rp. 600.000) hanya cukup untuk menggaji satu orang guru sedikit di atas UMR, tidak termasuk gaji pimpinan sekolah, staf pendukung, dan yang lain-lainnya.

Sebagian masyarakat yang sudah terlanjur berharap pada pendidikan gratis untuk anak berusia tujuh sampai dengan 15 tahun akan merasa kecewa karena ternyata orang tua atau wali murid masih harus membayar iuran pendidikan. Sekali lagi, mereka akan beranggapan bahwa yang dilaksanakan hanyalah penggantian istilah dan permainan kata-kata (SPP ditiadakan dan kemudian juga iuran BP3 tidak diberlakukan namun ternyata tetap masih ada biaya yang harus dikeluarkan).

Orang tua (terutama dari kalangan miskin) semakin tercekik dengan berbagai biaya tambahan mulai dari seragam, buku pelajaran, darmawisata, dan lain-lain. Dalam lingkaran setan kemiskinan pendidikan, siswa (orang tua siswa) lah yang menjadi korban pada tataran yang paling menderitanya. Dalam proyek pengadaan buku pelajaran, seragam dan sebagainya, guru (dan juga kepala sekolah) mengambil keuntungan dengan dalih kesejahteraan guru yang sangat memprihatinkan. Jika siswa tidak mampu membayar berbagai biaya tambahan tersebut, terancam lah kesinambungan pendidikannya. Dan akhir-akhir ini banyak siswa yang melakukan upaya bunuh diri karena



tidak mampu membayar uang sekolah dan berbagai biaya lainnya. Siswa secara langsung terkena dampak psikisnya. Tampaknya tidak ada pihak yang merasa peduli terhadap fenomena ini, bahkan dari sekolah maupun pemerintah sekalipun.

Dalam lingkaran setan kemiskinan, siswa (dan orang tua siswa) lah yang menjadi korban pada tataran yang paling menderita..... Akhir-akhir ini banyak siswa yang melakukan bunuh diri karena tidak mampu membayar uang sekolah dan berbagai biaya lainnya. Siswa secara langsung terkena dampak psikisnya.

Kekurangsadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan merupakan fenomena pedang bermata dua. Seperti pada APBN dan APBD, anggaran rumah tangga untuk pendidikan dalam kebanyakan keluarga di Indonesia masih sangat rendah. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan Ketidakberdayaan masyarakat dalam banyak hal. Peran struktural negara

dalam sistem pendidikan nasional sedemikian kuatnya sehingga mengikis peran kultural masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kurang peduli terhadap pendidikan (baca: sistem sekolah formal).

Pada sisi yang lain, fenomena ini bisa jadi merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap signifikansi pendidikan (baca: sistem sekolah formal) dalam perubahan kualitas hidup. Proses yang terjadi di sekolah dianggap sebagai ritual formalitas yang berkisar dari menjemukan sampai dengan menyiksa anak namun perlu dilakukan agar mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah berupa ijazah untuk bisa memasuki jenjang selanjutnya. Sekolah hanya dianggap sebagai lembaga pemberi ijazah. Bagi keluarga miskin, harga yang harus mereka bayar untuk membeli ijazah ini terlalu mahal sehingga putus sekolah merupakan konsekuensi logis. Sedangkan bagi keluarga yang mampu secara finansial, biaya minimal untuk mengikuti formalitas perolehan ijazah direlakan asal tidak terlalu menggerogoti anggaran rumah tangga. Biaya yang lebih besar sebetulnya dianggarkan untuk pendidikan non-formal (les pelajaran, musik, seni, sanggar dan sebagainya).



Pada sekolah tertentu materi pelajaran yang terlalu padat tidak optimal disampaikan dan dilatihkan kepada siswa, sehingga siswa harus mempelajari dan melatih diri materi pelajaran dengan bantuan pembimbing, baik bimbingan dari orang tua bila masih terdapat waktu senggang ataupun bimbingan dari guru les. Bahkan terjadi seorang ibu rumah tangga yang bergelar profesi bergengsi di masyarakat (misalnya dokter dan notaris), atau memiliki potensi berkarir, rela tidak menjalankan profesinya karena harus membimbing anaknya menyerap materi yang demikian padat diberikan oleh guru atau sekolah kepada anaknya.

Bahkan terjadi seorang ibu rumah tangga yang bergelar profesi bergengsi di masyarakat (misalnya dokter dan notaris), atau memiliki potensi berkarir, rela tidak menjalankan profesinya karena harus membimbing anaknya menyerap materi yang demikian padat diberikan oleh guru atau sekolah kepada anaknya.

Seandainya ibu rumah tangga ini menjalankan profesinya sehingga dapat mencapai penghasilan Rp. 5.000.000,- per bulan, berarti biaya tidak tampak membimbing anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan. Hal yang serupa juga terjadi pada masyarakat menengah ke bawah dengan besar biaya yang berbeda -- Lalu bagaimana pula bila orang tua tidak mampu membimbing anak belajar karena pendidikannya sendiri masih rendah, dan tidak mempunyai kemampuan menggaji guru les ? Kondisi ini semakin menunjukkan kesenjangan kemampuan menyerap materi pelajaran antara masyarakat lapisan atas dan bawah -- Akibatnya sistem pendidikan (kurikulum) di Indonesia sebenarnya menghambat karir orang tua (dan membebani anak didik).

Ada suatu informasi, di beberapa negara Eropa seperti Belanda, misalnya, sistem pendidikan (kurikulum) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan anak dan tetap memperhatikan karir orang tua. Sebenarnya tugas guru dan sekolah agar siswa dapat menyerap sepenuhnya materi pelajaran tanpa perlu bimbingan guru les atau bimbingan orang tua secara berlebihan. Di Singapura, bila anak dipandang tidak mampu menyerap materi secara cukup, guru yang bersangkutan harus meluangkan waktu berkunjung ke rumah anak didik



untuk memberikan pelajaran tambahan hingga anak berkembang dan dapat dianggap telah mampu dengan materi pelajarannya, tanpa dipungut biaya.

Perlu ditekankan tanggung jawab guru/sekolah yang berperan sebagai agen transfer ilmu pengetahuan.

Contoh di atas bukan ingin membandingkan pendidikan di negara satu dengan negara yang lain, tetapi ingin menekankan tanggung jawab guru/sekolah yang berperan sebagai agen transfer ilmu pengetahuan.

Sering terjadi, hari ini pemberitahuan akan ada penilaian suatu mata pelajaran, minggu depan harus siap dengan penilaian tanpa ada pelatihan yang memadai, bahkan kebetulan sekaligus penilaian beberapa mata pelajaran. Dalam kondisi seperti ini terpaksa anak diberi pelajaran tambahan yang dibimbing oleh guru les ataupun orang tua, yang nota bene membutuhkan biaya ekstra dan seringkali besarnya melebihi biaya SPP sekolah.

## **B. DIMENSI KULTURAL DAN STRUKTURAL PENDIDIKAN NASIONAL**

Pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan merupakan konsep dinamis yang menyangkut dua dimensi: kultural dan struktural. Pada dimensi kultural, kesadaran publik sangat berperan bagi tumbuhnya pendidikan yang bermutu. Partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan di Indonesia nampak jelas sejak sebelum kemerdekaan. Sejak jaman pra-kolonial, berbagai lembaga swadaya masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa. Menurut I-Tsing seperti dikutip dalam Mestoko (hal 61), ada sebuah "universitas" dengan sistem asrama di Sriwijaya yang menampung ratusan mahasiswa yang belajar agama Buddha. Sistem dan metode mengikuti model India sehingga biarawan dari Cina bisa belajar di Sriwijaya dulu sebelum melanjutkan studi di India.

Kemudian pada jaman Hindu di Indonesia, ilmu pengetahuan berkembang pesat khususnya di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan, tata negara dan hukum. Penyebaran agama Islam di Indonesia disertai dengan pendidikan berbasis masyarakat yakni pendidikan di langgar dan pesantren. Sistem pendidikan Islam ini masih



bertahan meskipun sistem pendidikan modern telah berperan dan mendominasi dunia pendidikan di Indonesia. Sebelum penjajahan Belanda, sekolah-sekolah yang didirikan para misionaris Katolik juga ikut berperan dalam pendidikan masyarakat.

Pada dimensi kultural, peran masyarakat berlanjut terus pada jaman kolonial. Sekolah-sekolah swasta berperan mendidik anak-anak muda yang kelak mempertanyakan dan memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Indonesia. Tercatat dalam sejarah, sekolah-sekolah berbasis pesantren, Taman Siswa, dan sekolah-sekolah Katolik merupakan tempat persemaian para pemikir, pemimpin, pejuang, dan pekerja yang kelak merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Sampai kinipun, sekolah-sekolah swasta masih sangat berperan dalam pengembangan masyarakat Indonesia. Kesadaran dan partisipasi masyarakat ini patut dihargai namun tidak akan membuahkan hasil secara optimal jika proses dalam dimensi struktural tidak berjalan dengan seimbang.

Pada dimensi struktural, peran serta negara (pemerintah) dalam bidang pendidikan mulai nampak secara nyata sejak pemerintahan Hindia Belanda. Prinsip pendidikan diselenggarakan agar anak didik di kelak kemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi kepentingan kolonial. Kebetulan pula pada abad ke-18 ketika Eropa dilanda pemikiran *Aufklarung* atau *Enlightenment*, penekanan pada akal sehat dan kemerdekaan pribadi juga ikut mempengaruhi ideologi pendidikan. Kemerdekaan dan kebebasan pribadi merupakan salah satu ciri pemikiran *Aufklarung*. Karena itu paham ini berusaha memperjuangkan hak-hak asasi manusia terhadap absolutisme negara atau pemikiran.

Salah satu tokoh *Aufklarung* J.J. Rousseau menganjurkan agar anak didik sedemikian rupa sehingga dia dapat memilih sendiri agama yang akan dianutnya. *Aufklarung* juga melandasi kebijakan pemisahan antara negara dan agama (gereja). Agar pendidikan bebas dari intervensi agama, pemerintah mengambil alih peran swasta dan memperbanyak sekolah-sekolah negeri. Di Indonesia pun, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional makin menonjol. Berbeda dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga agama tertentu yang mengutamakan warga agama masing-masing, maka sekolah-sekolah negeri (seharusnya) terbuka bagi



seluruh lapisan warga masyarakat yang membebankan kewajiban penyelenggaraan kepada negara (pemerintah).

Departemen Pendidikan Nasional sebagai penanggungjawab kemajuan pendidikan di Indonesia harus membuktikan komitmennya dalam memenuhi hak rakyat dan peningkatan kualitas pendidikan. .... yang belum jelas adalah komitmen untuk menyentuh akar permasalahan dalam bidang pendidikan dan skenario mengatasi berbagai permasalahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Minimnya tanggung jawab dan peran pemerintah dalam bidang pendidikan akan semakin mengukuhkan segregasi siswa berdasarkan status sosio-ekonomi.

Selanjutnya pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk memenuhi hak warga atas pendidikan yang bermutu untuk pembangunan. Departemen Pendidikan Nasional sebagai penanggungjawab kemajuan pendidikan di Indonesia harus membuktikan komitmennya dalam memenuhi hak rakyat dan peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak anak seperti dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak. Selain itu, pasal 31 amandemen UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat 2 menyatakan bahwa

"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Janji pemerintah ini dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 11 Juni 2003 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Juli 2003 yang menyebutkan antara lain:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1).
2. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (pasal 6 ayat 1).
3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1).



- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terwujudnya anggaran guru kecukupanannya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (jumlah 11 juta 2).

Salah satu pemerintah ini sudah sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Pendidikan yang ditandatangani di Dublin, Senegal, Afrika tahun 1966 yang menyatakan bahwa semua negara diwajibkan untuk menyediakan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya. Selanjutnya, dalam masa kampanye legislatif dan eksekutif, pendidikan menjadi komoditas yang ditunjukkan. Semua telah menunjukkan perubahan sektor pendidikan. Yang belum jelas adalah komitmen untuk menyelesaikan atau permasalahan dalam bidang pendidikan dan secara mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Pendidikan dasar telah era dengan berbagai permasalahan pendidikan.

Selama masa pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, beberapa catatan reflektif perlu dikemukakan agar program pemenuhan wajib belajar sembilan tahun bisa menjadi lebih baik di kemudian hari dan agar program bantuan operasional sekolah (BOS) melalui pengurangan subsidi BBM tidak menjadi sekedar tindakan taktis semata.

Program pemberian subsidi biaya minimal pendidikan dasar telah menimbulkan dua macam kekecewaan. Yang pertama, sebagian masyarakat yang sudah terlanjur berharap pada pendidikan gratis untuk anak berusia tujuh sampai dengan 15 tahun akan merasa kecewa karena ternyata orang tua atau wali murid masih harus menanggung beban pendidikan. Sekali lagi, mereka akan beranggapan bahwa yang disediakan hanyalah penggantian istilah dan pemenuhan ke-ke-ke-ke (KPK) dan kemudian juga harus BPS untuk diperlakukan secara layak tetap masih ada biaya yang harus dikeluarkan).

Yang kedua, orang tua (terutama dari kalangan miskin) sudah terkejut dengan berbagai biaya tambahan mulai dari seragam, buku pelajaran, dana wisata, dan sebagainya. Dalam lingkungan sosial kemiskinan pendidikan, siwalah yang menjadi korban pada tingkat yang paling mendasar. Dalam proyek pengadaan buku pelajaran, seragam dan sebagainya, guru (dan juga kepala sekolah) mengabdikan keuntungan dengan dalih kesejahteraan guru yang sangat



memprihatinkan. Jika siswa tidak mampu membayar berbagai biaya tambahan tersebut, terancam lah kesinambungan pendidikannya.

### C. KESENJANGAN ANTARA SEKOLAH KAYA DAN MISKIN

Pembiayaan pendidikan yang setengah-setengah oleh pemerintah akan menimbulkan (atau semakin mengukuhkan) kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Minimnya tanggung jawab dan peran pemerintah dalam bidang pendidikan akan semakin mengukuhkan segregasi siswa berdasarkan status sosio-ekonomi. Siswa-siswa dari keluarga miskin yang mendapat subsidi pemerintah tidak akan mampu menanggung kekurangan biaya sehingga mereka akan terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang minim kondisinya (baca: miskin) dengan biaya operasional per anak tidak (jauh) melebihi subsidi minimal yang diberikan pemerintah.

Sementara itu, siswa-siswa dari kelas menengah dan atas bebas memilih sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai karena mereka memiliki kemampuan membayar kekurangannya. Selanjutnya, karena sekolah-sekolah ini mendapatkan dana pendidikan yang memadai dari siswa, sekolah-sekolah ini juga akan mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu pendidikan. (Catatan: Memang besarnya anggaran tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan di suatu sekolah. Namun anggaran yang terbatas hampir dapat dipastikan sangat menghambat peningkatan mutu pendidikan). Dalam jangka panjang, disparitas sekolah miskin dan kaya serta anak miskin dan kaya akan semakin lebar. Bahkan, di beberapa daerah banyak sekolah miskin harus ditutup karena memang sudah tidak mampu lagi membiayai penyelenggaraan pendidikan.

Efek kemiskinan dalam pendidikan juga memperlebar jurang antara kota dan desa (Tambunan, *Kompas*, 20 Juli 2004). Kesenjangan antara sekolah kaya dan miskin ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara sekaya Amerika Serikat pun. Disparitas ini muncul di permukaan sebagai suatu fenomena neo-liberalisme yang sangat memprihatinkan (Baca *Savage Inequalities* oleh Jonathan Kozol).

Segregasi sekolah berdasarkan status sosio-ekonomi siswa sudah semakin kentara dewasa ini, terutama di perkotaan. Ada sekolah-



sekolah unggulan yang dipenuhi oleh anak-anak dari keluarga berkecukupan sementara itu anak-anak dari keluarga miskin harus bersekolah di bangunan yang hampir atau sudah roboh. Situasi ini akan menjadi makin parah jika rencana pemerintah membagi jalur pendidikan menjadi jalur pendidikan formal mandiri dan formal standar seperti tertulis dalam Rencana Strategis 2004-2009 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan jadi dilaksanakan.

Jalur pendidikan formal mandiri diperuntukkan bagi mereka yang mampu secara akademik maupun finansial sekalipun disediakan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial untuk masuk jalur ini melalui program bea siswa. Jalur formal standar - yang sebagian besar didanai oleh pemerintah - diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu secara finansial dengan memberikan program keterampilan dan diarahkan untuk mencari kerja. Jika benar pembagian berdasarkan perbedaan kemampuan akademik dan finansial siswa jadi dilakukan, pemisahan anak berdasarkan kaya-miskin atau pintar-bodoh sungguh akan membawa dampak sangat negatif bagi proses pendidikan setiap anak.

Anak-anak dari keluarga miskin akan terkonsentrasi di sekolah-sekolah miskin dan kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih bermutu atau sebanding dengan anak-anak yang lebih beruntung di sekolah lain. Pada sisi yang lain, anak-anak dari keluarga yang mampu tidak mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak miskin yang seharusnya bisa memperkaya proses pembelajaran dan sosialisasi di sekolah dengan latar belakang pengalaman mereka yang berbeda.

Pemikiran membagi dua jalur pendidikan menunjukkan kurangnya keberpihakan dan komitmen pemerintah untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Membagi jalur pendidikan untuk memisahkan anak berdasarkan kategorisasi anak pintar dan bodoh atau kaya dan miskin merupakan suatu upaya pembodohan bangsa dan pelepasan tanggung jawab atas pendanaan pendidikan. Kebijakan dan tindakan ini akan mengarah kepada dehumanisasi yang makin parah dalam dunia pendidikan.

Ketika Menteri Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembagian jalur pendidikan ini hanya wacana belaka (walaupun sudah



tertulis dalam Rencana Strategis 2004-2009) dan malah mempersoalkan pembocoran dokumen negara, masyarakat justru menjadi makin terganggu dengan kekacauan konsep dan kelemahan visi pendidikan pada tingkat nasional.

#### **D. KESENJANGAN ANTARA KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN NEGARA**

Mengacu pada pasal 31 amandemen UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan Konvensi Deklarasi pemerintah wajib menyediakan pendidikan bermutu secara gratis kepada setiap warga negara. Selain itu, pasal 49 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)." Dengan demikian pendidikan seharusnya mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah.

Awal Juli 2005, pemerintah dan DPR RI memang telah berhasil menguatkan komitmen pemenuhan anggaran pendidikan melalui skenario progresif. Artinya, dalam periode 2004-2009, pemenuhan anggaran pendidikan akan dilakukan secara bertahap. Rinciannya: 6,1 persen (2004), 9,29 persen (2005), 12,01 persen (2006), 14,68 persen (2007), 17,40 persen (2008) dan 20,10 persen (2009). Namun komitmen tinggal komitmen. Karena realisasi APBN 2004 dan 2005 ternyata telah melenceng dari skenario tersebut. Dalam APBN 2004 anggaran pendidikan dipatok sebesar Rp. 15,34 triliun atau 3,49 persen dari total APBN. Kendati telah ditingkatkan menjadi Rp 17,2 triliun atau 6,4 persen dari total APBN 2005, angka ini masih jauh di bawah target skenario progresif di atas.

Dalam konteks negara yang sedang mengalami krisis multidimensional, keterbatasan dan ketidakmampuan pemerintah seringkali diajukan kepada masyarakat untuk dipahami dan diterima. Bahkan pemahaman dan penerimaan masyarakat ini juga diikuti oleh dukungan dan partisipasi masyarakat untuk mengisi kekosongan yang ada. Misalnya saja, swadaya masyarakat dalam pengelolaan sekolah swasta.



serius jika pemerintah masih beritikad baik untuk memperbaiki kinerjanya dan meraih kembali kepercayaan publik.

### **E. OTONOMI DAERAH**

Alokasi minimal 20 % dari APBN dan APBD yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tetapi tidak terpenuhi di tingkat nasional kemungkinan besar juga akan sulit terjadi di daerah-daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menentukan anggaran pendidikan dalam APBD-nya. Kondisi dan kemampuan setiap daerah tentunya berbeda. Ada daerah yang mungkin sudah mampu untuk menggratiskan pendidikan dasar. Sementara itu daerah lain masih belum sanggup.

Alokasi anggaran pendidikan di berbagai kabupaten juga masih sangat kecil. Beberapa kabupaten mungkin sudah menetapkan 20 % atau bahkan lebih untuk anggaran pendidikan. Namun, yang perlu dicermati adalah pos-pos anggaran belanja. Alokasi anggaran pendidikan 20 % seharusnya di luar belanja pegawai/personalia pada pos Belanja Administrasi Umum (BAU). Tidak dimasukkannya belanja pegawai/personalia ini karena banyak daerah melakukan *replacement* anggaran dengan memasukkan gaji guru dan (sebagian) pegawai Dinas Pendidikan ke dalam belanja publik, bukan belanja aparatur. Karena itu, untuk mengetahui besarnya anggaran pendidikan, belanja pegawai/personalia pada pos BAU tidak dihitung sebagai bagian dari belanja publik. Komponen utama belanja ini adalah gaji dan tunjangan serta biaya pengembangan sumber daya manusia. Walaupun belanja ini tidak seluruhnya diperuntukkan untuk gaji guru, tetapi gaji guru tetap mengambil porsi terbesar belanja ini. (Sumber: *Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi/JPIP*),

Variasi antar daerah yang sangat tinggi akan mengarah kepada kesenjangan pendidikan dan pembangunan manusia di berbagai daerah. Kesenjangan ini selanjutnya juga akan berpengaruh pada kemajuan masing-masing daerah di kemudian hari. Untuk meminimalkan kesenjangan antar daerah, peran pemerintah pusat masih dibutuhkan. Perlu ada kesepakatan dan penetapan biaya maksimal yang harus dibebankan kepada siswa (terutama untuk sekolah-sekolah negeri).



Kebijakan program BOS yang sudah dijalankan perlu dikaji dan dievaluasi pelaksanaannya. Berbagai keluhan mengenai penyimpangan dalam distribusi dan pencairan bantuan operasional sekolah ini terdengar di sana sini. Pada tingkat sekolah, keluhan tersebut berkisar mengenai rumitnya proses pengajuan data siswa yang membutuhkan bantuan, pemotongan dana subsidi pada saat pencairan dan kesalahpahaman petugas Dinas Pendidikan mengenai perbedaan antara pengelolaan sekolah negeri dan swasta.

Ketika Dinas Pendidikan di suatu kabupaten memberikan sekolah swasta subsidi biaya minimal bagi sebagian siswanya dan melarang sekolah tersebut untuk menarik biaya tambahan lagi dari siswanya, pengelola sekolah swasta merasa keberatan. Dana BOS masih belum memadai sebagai biaya operasional pendidikan karena berbeda dengan sekolah negeri, pengelola sekolah swasta harus menggaji guru mereka sendiri dan mengeluarkan dana untuk berbagai keperluan lain. Jadi karena merasa tidak sanggup memenuhi ketentuan Dinas Pendidikan setempat, pengelola sekolah swasta memutuskan lebih baik menolak saja pemberian dana BOS dan sebagai gantinya tetap memungut dari siswa. Dalam hal ini, tentunya siswa miskin di sekolah swasta tersebut yang menjadi korban.

Pada tingkat siswa, keluhan berupa tidak transparannya pihak sekolah dalam mengelola dana BOS dan penyalahgunaan dana tersebut. Ada laporan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa malah dihabiskan untuk menambah kenyamanan pimpinan sekolah dan guru. Seperti diberitakan di media massa, ada sekolah yang menggunakan dana tersebut untuk membeli AC untuk ruang kepala sekolah dan guru. Pernah pula diberitakan mengenai ketidaksesuaian dalam jumlah dana yang dialokasikan dan yang tersedia serta berkurangnya dana subsidi pendidikan (*Kompas*, 7 April 2005). Walaupun tidak banyak dari beberapa pihak (baik individu siswa maupun sekolah) yang telah menjadi korban penyimpangan, namun mereka tidak mempunyai keberanian untuk melapor kepada institusi yang berwenang. Persoalan ini perlu diperhatikan secara serius dan ditindak-lanjuti agar masa depan anak-anak bangsa tidak dipermainkan.



penyelewengan yang mungkin muncul harus disiapkan agar *good governance* tidak hanya menjadi slogan semata.

Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas ini harus betul-betul dilaksanakan terutama untuk mengantisipasi pelaksanaan bantuan dana pendidikan dari program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan bantuan operasional sekolah. Mekanisme seleksi penerima dana dan penentuan kuota murid penerima bantuan pada tingkat pusat dan provinsi serta penentuan jatah siswa penerima bantuan di tingkat kabupaten/kota dan penjaringan calon penerima di tingkat sekolah (*Kompas*, 2 Maret 2005) harus diawasi bukan hanya oleh tim bentukan Departemen Pendidikan Nasional melainkan oleh berbagai tim independen maupun lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dengan media massa.

### G. DINAMIKA NEGARA DAN MASYARAKAT

Dinamika yang sehat di antara dimensi kultural dan struktural seharusnya bisa menghasilkan rumusan kebijakan pendidikan yang tepat dan kontekstual dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Kebijakan ini seharusnya mengarah pada praktik-praktik pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan anak-anak bangsa untuk menerima dan melaksanakan tanggung jawab dalam pembentukan dan pengembangan masa depan yang lebih baik.

Format dinamika antara peran pemerintah dan peran publik merupakan suatu proses yang mesti dinegosiasikan secara terus menerus. Format dinamika ini tidak hadir di ruang hampa. Ada berbagai faktor sosial, ekonomi, politik dan demografi yang akan ikut mewarnai proses negosiasi ini. Selain itu, proses negosiasi ini juga berjalan seiring dengan proses pendewasaan masyarakat kewargaan (*civil society*) di Indonesia yang memang masih jauh dari titik tuntas. Secara ideal, format dinamika ini bertransformasi pada spektrum tataran *blue print* (konsep, visi, dan *grand design*) dan tataran praksis (target, proses, teknis pelaksanaan, dan instrumen).

Pada dimensi struktural, bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mempunyai kemampuan untuk membaca kebutuhan masyarakat bukan hanya di masa kini melainkan juga di masa mendatang dan menentukan visi jauh ke depan beserta strategi-strategi yang konseptual. Birokrasi pendidikan diharapkan tidak



terperangkap dalam pekerjaan-pekerjaan teknis dan instrumental yang seharusnya menjadi bagian peran sekolah-sekolah agar tidak mengikis keberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, proyek EBTANAS, UAN ataupun UNAS sudah menunjukkan betapa pemerintah sudah melakukan intervensi terlalu jauh pada implementasi teknis tanpa landasan konsep yang jelas. Sentralisasi ujian yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1980-an ini berkorelasi dengan kemerosotan kompetensi guru dalam merancang dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran mereka sendiri.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan memfasilitasi upaya dan inisiatif masyarakat untuk ikut berperan dan memajukan pendidikan anak-anak bangsa. Saat ini, jangankan sekolah-sekolah alternatif, sekolah-sekolah formal saja (apalagi yang swasta) belum mendapatkan bantuan atau dukungan secara berarti (di balik segala bentuk intervensi pemerintah dalam pengelolaan sekolah).

Pada sisi yang lain, masyarakat (khususnya para pendidik) perlu bekerja keras dan cerdas untuk mengatasi ketidakberdayaan sebagai akibat dari hegemoni negara yang berkelanjutan dan untuk membuktikan kemampuan diri. Organisasi sekolah juga perlu terus mereformasi diri. Upaya reformasi diri ini tentunya tidak mudah karena adanya berbagai hambatan baik dari birokrasi maupun kekurangpedulian *stakeholders* pendidikan. Organisasi sekolah perlu mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap lateral serta inovatif untuk bisa menembus kebekuan *status quo*. Ketertinggalan mutu pendidikan memang sangat memprihatinkan namun tidak akan bisa diatasi hanya dengan ratap tangis.

Pendidikan adalah lokomotif yang akan membawa bangsa ini dalam perjalanan menuju kondisi yang lebih baik. Janji para eksekutif dan wakil rakyat yang sudah terpilih untuk mengedepankan pendidikan perlu diikuti dengan komitmen dan kejujuran untuk berpikir dan bertindak di atas kepentingan sendiri dan golongan agar bangsa ini bisa lebih cerdas di kemudian hari. Tentunya, masyarakat juga harus menggunakan hak mereka untuk terus mengontrol pemenuhan janji tersebut.



### BAB 3

## DARI UJIAN NEGARA SAMPAI PELECEHAN DI WARUNG KOPI

Dr. J.C. Tukiman Taruno  
*Konsultan UNICEF*

*- Harapan adalah suatu resiko yang harus dijalarkan  
(George Bernard Shaw) -*

#### **Pengantar**

Ujian Negara dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, lalu masuk akalkah, realistiskah Ujian Negara sebagai tolok ukur kualitas pendidikan Indonesia ? Awal tulisan ini ingin melihat kelayakan Ujian Negara dalam realita di lapangan. Setelah pertanyaan ini dijawab, lalu bagaimana alternatif meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Mungkinkah Paguyuban Komite Sekolah (PKS) diberi peran sebagai pendongkrak kualitas pendidikan ? Pembahasan ini ingin melihat alternatif peningkatan kualitas pendidikan Indonesia selain tolok ukur Ujian Negara. Disebut alternatif, karena sebenarnya ada banyak alternatif lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Dari kualitas pendidikan tulisan ini selanjutnya membahas persoalan pembiayaan pendidikan yang diawali dengan pelecchan di 'warung kopi'. Meskipun beberapa kasus yang diberikan pada naskah ini terjadi beberapa waktu lalu, tetapi hikmahnya dapat dipetik untuk membuat suatu kebijakan di bidang pendidikan.

#### **A. DARI UAN KE UN**

Pada Rabu, 19 Januari 2005, sebuah SMA swasta favorit di Semarang membagikan rapor semester pertama. Rapor untuk siswa kelas 2 dan 3 masih tetap bercorak Kurikulum 1994 (meliputi dua halaman), yaitu lembar/halaman kiri yang mencantumkan format tentang nilai (angka dan huruf) serta nilai rata-rata kelas (angka dan huruf) untuk 13 matapelajaran. Di bawah format itu namun masih pada halaman yang sama, tertera format untuk ekstrakurikuler dan nilainya, kepribadian dan nilainya, serta keterangan ketidakhadiran. Sedang di



lembar/halaman kanan format perihal 'catatan' untuk diperhatikan orangtua/wali.

Rapor untuk siswa kelas I (disebutkan kelas X) sudah bercorak Kurikulum 2004 (konon antara ragu dan malu disebut KBK = Kurikulum Berbasis Kompetensi), terdiri tiga halaman. Halaman/lembar kiri berisi delapan kolom dari empat substansi, yaitu (a) Nomer, (b) Mata Pelajaran (MP), (c) Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM), dan (d) Nilai Hasil Belajar (NHB) terbagi dalam kolom-kolom kecil untuk nilai kognitif, praktik, dan sikap. Dalam kolom MP ada 16 mata pelajaran disebutkan secara tertulis, dan pada nomer urut 16 tertulis Keterampilan/Bahasa Asing. Pada nomor urut 17 dan 18 hanya berupa titik-titik dengan keterangan harap diisi sesuai dengan mata pelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Pada halaman/lembar kanan berisi deskripsi tentang Ketercapaian Kompetensi Siswa (KKS) untuk setiap mata pelajaran; sedang lembar sebaliknya berupa penilaian perihal kegiatan ekstrakurikuler dan kepribadian, serta keterangan ketidakhadiran siswa.

Contoh atau uraian di atas saya anggap sangat penting terutama berkaitan dengan akan terjadinya perubahan dari sistem Ujian Akhir Nasional (UAN) ke Ujian Nasional (UN) pada tahun 2005 ini. Pertanyaannya ialah: Perubahan ini konseptual atautkah sekedar tambal sulam? Jawaban sementara saya ialah tambal sulam belaka, karena perubahan itu tidak/belum sesuai dengan fakta lapangan.

Empat alasan mengapa saya melihatnya masih berupa kebijakan tambal sulam. **Pertama**, perubahan UAN ke UN rasa-rasanya "mengingkari" pentahapan implementasi Kurikulum 2004. Selama ini, Depdiknas selalu menegaskan bahwa penerapan Kurikulum 2004 perlu dilakukan bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing sekolah. Bukti lapang menunjukkan bahwa Kurikulum 2004 sudah dilaksanakan oleh hampir semua sekolah tetapi baru untuk siswa klas 1, sebagian sekolah sudah dilakukan untuk siswa klas 2, dan sangat sedikit jumlah sekolah yang telah menerapkannya untuk siswa klas 3. Betapa kagetnya membaca harian *Kompas* (Kamis, 20 Januari 2005 hal. 1 dan 11) yang antara lain menegaskan bahwa mata pelajaran yang akan di-Ujian Negara-kan tahun 2005 ini salah satunya ialah Bahasa Asing selain Inggris. Bagaimana mungkin siswa kelas 3 SMA yang selama ini masih berkuat dengan kurikulum 1994 tiba-tiba dalam UN 2005 nanti harus diuji menggunakan tolok ukur kurikulum 2004?



## Harapan Nasional dan Fakta di Lapangan

Ujian bertaraf nasional memang sangat berkaitan erat dengan harapan adanya standar (nilai) nasional, dan tentu saja hal itu harus ada anggaran nasional juga. Namun janganlah dilupakan, desentralisasi pendidikan sedang dalam tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan desentralisasi itulah terdapat fakta di lapangan yang sangat berbeda-beda. Karena itu yang saat ini menjadi sangat penting harus dilakukan oleh jajaran Depdiknas ialah perlu adanya kebijakan konseptual (bukan tambal sulam), yang mampu memadukan antara tuntutan dan harapan nasional tersebut dengan fakta di lapangan.

Ada tiga pokok pikiran saya sampaikan, **pertama**, kebijakan nasional hendaknya tidak mudah berubah-ubah. Kalau UAN tahun lalu menuai badai lebih-lebih karena adanya kebijakan mendadak tentang konversi, serta merta ada gelombang tuntutan agar UAN tidak lagi diseienggarakan/dibiayai APBN; lalu UAN akan diganti UN. Rasanya hal itu berarti bahwa kebijakan nasional rentan berubah-ubah dan tidak ada jaminan akan lebih baik. Perubahan secara konseptual dari UAN ke UN - kalau memang ada - harus disebarluaskan terlebih dahulu kepada masyarakat. Tidak ada jeleknya seorang Menteri atau Dirjen menulis di media cetak menguraikan perihal itu untuk memperoleh masukan.

**Kedua**, standar (nilai) nasional hendaknya tidak gampang diubah-ubah, kecuali sejak awal kebijakan itu memang sudah ditegaskan bahwa akan terjadi perubahan pada tahun tertentu dengan selang waktu yang cukup untuk adaptasi antara pemberitahuan dan pelaksanaannya. Standar nilai yang berubah-ubah bukannya akan mendorong peningkatan mutu, melainkan justru akan menimbulkan kepanikan, terutama karena pemberitahuan itu datang saat-saat ketika sekolah-sekolah merasa waktunya sudah terlalu dekat ke masa-masa ujian.

**Ketiga**, baik kiranya ada standar nilai propinsi sebagai penyeimbang bagi standar nilai nasional. Naiknya standar nilai nasional menjadi 4,25 untuk UN 2005 ini sudah menggambarkan betapa nantinya akan ada banyak masalah. Mengapa? Tahun lalu dengan standar lebih rendah saja masalahnya relatif 'mengguncang'. Standar nilai propinsi sangat dibutuhkan bukan saja untuk menyeimbang standar nilai nasional, tetapi juga kelak ketika para siswa akan melanjutkan ke perguruan tinggi.



## B. MENCARI SOSOK PAGUYUBAN KOMITE SEKOLAH

Sukoharjo merupakan kecamatan pengembangan dari Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Mungkin karena kecamatan baru, ada semangat menggebu di kalangan penduduk dan aparatnya. Ada saja gebrakan menarik yang terjadi di sana. Salah satu di antaranya ialah terbentuknya Paguyuban Komite Sekolah/Madrasah. Di kecamatan Sukoharjo terdapat 27 Sekolah Dasar (termasuk MI), dan Agustus 2003 lalu semua pengurus Komite Sekolah/Madrasah sepakat membentuk **paguyuban komite** dalam rangka "menciptakan masyarakat peduli pendidikan anak".

Dalam perkembangannya, paguyuban yang rutin rapat setiap tiga bulan sekali bergilir dari satu sekolah ke sekolah lain ini, pada rapat terakhir tanggal 31 Mei 2005 lalu menyepakati antara lain "semua lulusan SD/MI tahun 2004/05 ini harus melanjutkan sekolahnya." Ketua Paguyuban Komite Sekolah/Madrasah, Bapak Suatam, menganggap penting kesepakatan itu karena dua alasan mendasar, yakni pertama, Sukoharjo ingin mendukung program propinsi Jateng dalam hal tuntas wajar pendidikan dasar pada tahun 2007; dan kedua, menekan turunnya angka tidak melanjutkan ke SMP sederajat dari empat persen (tahun lalu) ke nol persen.

### Pemicu

Pada Juli 2003, delapan orang Ketua Komite Sekolah dari Kecamatan Sukoharjo diundang selama tiga hari mengikuti pelatihan PSM (Peran Serta Masyarakat) bersama 80 peserta lainnya. Pelatihan tingkat kabupaten itu menggunakan modul (disebut Modul PSM) yang terdiri dari lima unit, yaitu Komite Sekolah dan PSM, Stigma dalam PSM, Cara Mengetahui Kebutuhan dan Potensi Masyarakat, Membuat Rencana Pengembangan Sekolah, dan Menjaga Kesinambungan PSM.

Barangkali karena terinspirasi oleh pelatihan model andragogi itulah, pada bulan Agustus berikutnya kedelapan ketua Komite Sekolah tersebut mengundang rapat semua pengurus komite dari 27 SD/MI. Tercetuslah gagasan perlu adanya paguyuban komite, dan yang diperdebatkan dalam rapat pertama itu ialah: "Bagaimana paguyuban komite dapat meredam keluhan orangtua murid/masyarakat karena setiap kali ada saja **pungutan** dari sekolah dan konon selalu disebut sebagai iuran untuk ekstrakurikuler?" Rapat berkembang menjadi diskusi yang menarik, dan setelah didaftar berbagai kegiatan



mulai terbuka, pengurus inti paguyuban komite (lima orang) lalu menawarkan diri kepada pengawas untuk membantu melakukan monitoring dan supervisi ke sekolah-sekolah. Fokus perhatian pengawas ketika melakukan supervisi dan monitoring ke sekolah pada aspek manajemen dan pembelajaran, sedang paguyuban komite pada SM. Dalam setiap minggunya, pasangan seorang pengawas dan seorang pengurus paguyuban komite menjadwalkan dua kali ke sekolah. Hasil, hanya dalam waktu satu bulan, 27 SD/MI selesai dimonitoring oleh pasangan pengawas dan paguyuban komite.

Bulan-bulan berikutnya, pasangan pengawas dan pengurus paguyuban komite diubah, dan sekolah yang dimonitor pun berbeda. Terbukti, gebrakan itu membuahkan hasil yang sangat menarik, yakni disiplin kepala sekolah dan guru meningkat tajam, komite sekolah semakin mengetahui kebutuhan riil sekolah-sekolah, dan pengawas sangat senang serta bergairah karena terdukung dalam pelaksanaan tugasnya.

### **Dari Momok Menjadi Guyub**

Bukan rahasia lagi bila dikatakan bahwa posisi seorang pengawas TK/SD, di satu sisi sering sangat ditakuti oleh kepala sekolah apalagi guru-guru berkaitan dengan 'di tangannyalah' nasib mereka ditentukan. Namun di sisi lain, di balik rasa takut itu tidak kurang kepala sekolah atau guru-guru yang mencibir terhadap pengawas, apalagi kalau pengawas itu berperilaku tidak konsisten atau bahkan *overacting* (berperilaku secara berlebihan, ed.). Misalnya, apakah artinya pengawas selalu menegur atau bahkan memberi sanksi kepada guru karena tidak disiplin, kalau ia sendiri sebagai pengawas tidak memberi contoh disiplin?

Pengawas TK/SD di Kecamatan Sukoharjo sedang mengalami perkembangan positif saat ini. Kegiatan monitoring ke sekolah-sekolah yang kemarin-kemarin mengesankan menakutkan, menegangkan; atau 'sok cari-cari', kini sedang berubah. Monitoring ke sekolah-sekolah yang dilakukan secara berpasangan (antara pengawas dan pengurus paguyuban komite) serta merta dapat menepis hal-hal negatif yang selama ini sering dikeluhkan, seperti: 1) sekolah harus memberi 'amplop' kepada pengawas agar tidak ada buntut permasalahan setelah monitoring; 2) komite sekolah sering *overacting* bahkan intervensi terhadap kebijakan sekolah padahal hal itu bukan wewenangnya; 3)



kepala sekolah dan guru sangat sering menyembunyikan kekurangan, keburukan, dan senang melaporkan hal-hal yang baik-baik saja; serta 4) kualitas pendidikan sulit ditingkatkan kalau tidak perintah dari atas (pusat).

Perkembangan positif lain juga terjadi, misalnya hubungan antar kepala sekolah, guru, pengawas dan komite sekolah semakin akrab karena semakin sering bertemu. "Sekolah kami seumur-umur belum pernah termasuk 10 besar di tingkat kecamatan dalam hal kelulusan, tetapi tahun ajaran 2003/04 lalu, kami semua amat bangga karena termasuk dalam lima besar," papar ketua Komite SDN Pajeksan. Ia mau menegaskan bahwa karena guru-guru semakin disiplin dan suasana kerja di sekolah sangat mendukung, hasilnya terlihat pada peningkatan kualitas siswanya.

Ketika saya bertemu dengan semua anggota komite sekolah, kepala sekolah dan guru-guru SDN Jebeng Plampitan pada Jumat, 27 Mei 2005, salah seorang orang tua siswa kelas tiga berkisah, "Sekarang ini tidak ada lagi anak bolos sekolah, semua rajin masuk karena guru-guru mengajar penuh disiplin, kreatif, dan menyenangkan. Dulu, setiap kali hari pasaran, atau ada hajatan/pesta, hampir 15 persen anak-anak tidak masuk sekolah karena lebih senang ikut orang tuanya pergi ke pasar atau ke pesta sunatan, perkawinan, dan sebagainya." Dan yang lebih membanggakan baginya ialah, "Di rumah, anak saya menjadi sangat gemar membaca, sobekan koran saja ia baca kalau bahan bacaan sudah habis."

### **Mengubah Sikap Mental**

Jumat, 27 Mei 2005, siang hari, saya menghadiri rapat pengurus inti paguyuban komite sekolah kecamatan Sukoharjo. Ada tiga kata kunci yang berulang kali disebutkan oleh mereka sebagai kunci, sehingga paguyuban komite sekolah meyakini usahanya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka menyebutnya "**3 Berani**" yakni yang pertama, "kita harus **berani melangkah**." Kalau pun paguyuban telah ada/berdiri, namun jika tidak ada keberanian melakukan/melaksanakan langkah-langkah konkrit yang dikerjakan seperti melakukan monitoring, rapat rutin, menghitung dana, dan sebagainya, tentulah paguyuban tidak akan bermakna.

Kedua, "kita ini hanya bermodalkan **berani berkeringat**." Sebagai ilustrasi, wilayah Sukoharjo terdiri dari pegunungan. Pergi ke



SDN Jebeng Plampitan yang disebutkan di atas misalnya, tidak kurang dari 45 menit dari ibukota kecamatan, itu pun kalau mobil busur jeep atau kijang, sedang kalau sepeda motor harus sebuah kendaraan yang terhitung baru. Artinya, kalau pengawas dan paguyuban komite ingin melakukan monitoring ke sekolah-sekolah, mereka harus benar-benar siap dan berani berkeringat.

Ketiga, sesuai dengan ungkapan Bapak Suatam, ketua paguyuban, "kita ini harus berani menantang dan ditantang." Ia memberikan contoh, seminggu sebelum rapat rutin paguyuban komite yang diadakan pada Selasa, 31 Mei 2005, ia bersama seorang pengurus datang ke Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten. Intinya meminta agar ketua Dewan Pendidikan menghadiri rapat paguyuban komite. "Kalau Bapak tidak datang, saya minta ijin boleh rapat paguyuban di rumah Bapak ini." Tantangan itu terkesan menantang, arogan, dan memaksa, namun Suatam hanya akan menegaskan bahwa "Dewan Pendidikan itu diberi biaya operasional oleh APBD, jadi harus optimal pengabdianya."

### C. PELECEHAN DI 'WARUNG KOPI'

Di dusun kelahiran begawan ekonomi Indonesia (Prof. Sumitro), yakni Dawuhan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jateng, terdapat dua sekolah dasar negeri, masing-masing SDN 1 Dawuhan dan SDN Dawuhan 2. Dalam tiga tahun terakhir ini, kedua SD tersebut sedang terlibat dalam 'persaingan secara sehat' dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat peduli terhadap pendidikan anak. Hasilnya? Ternyata, dua sekolah yang hanya dipisahkan oleh sebidang lapangan olahraga itu, berbeda kinerjanya. SDN 2 selama tiga tahun ini berhasil menghimpun dana sebesar Rp 180 juta, dan dimanfaatkan antara lain untuk membangun ruang perpustakaan, membeli alat-alat *drum hand* dan membiayai pelatihannya, memberi beberapa unit komputer, dan membenahi halaman, tembok sekolah, taman, dan lain-lain.

Sementara, di SDN 1 terkumpul 'hanya' Rp 52 juta, dan pemanfaatannya terbatas untuk pembenahan-pembenahan fisik. Angka di atas dalam kurun waktu yang sama menunjukkan hasil yang berbeda. Ketika dicermati besarnya peran serta masyarakat, terbukti sama dipandang dari persentasenya, yaitu 75 persen pemanjakan berasal dari



obrolan warung kopi itu. **Pertama**, dewasa ini, sebutlah dalam konteks otonomi atau desentralisasi, semua sektor pemerintahan, bisnis, kemasyarakatan, dan sebagainya sedang belajar cara memaknai otonomi secara benar. Semua pihak sedang jatuh bangun, termasuk sekolah-sekolah juga sedang tertatih-tatih mencermati arti dan makna **otonomi pendidikan/sekolah**. Dan harap dimengerti, dalam rangka mengembangkan otonomi sekolah itulah, semua sekolah sedang belajar bekerjasama dengan Komite Sekolah. Jadi, obrolan warung kopi 'sekolah gratis' mencederai implementasi desentralisasi, termasuk otonomi sekolah.

**Kedua**, pemaknaan Komite Sekolah yang paling mendasar tentulah terletak pada upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam sekolah/pendidikan, mengingat Komite Sekolah ini sangat berbeda dari Pengurus BP3, POMG, dan sejenisnya. Artinya, otonomi pendidikan dapat semakin terwujud di sekolah itu manakala peran serta masyarakat semakin tinggi. Dan wujud dari tingginya peran serta masyarakat itu antara lain dapat disimak dari peningkatan dukungan masyarakat ke sekolah/pendidikan entah berupa dana, sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga, materi, dan sebagainya.

Dengan otonomi sekolah, **obrolan 'sekolah gratis' mencederai upaya-upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam sekolah/pendidikan**. Lebih dari itu, secara manusiawi obrolan 'sekolah gratis' telah meringgirkan, melecehkan dan menghinakan peran pihak-pihak yang menopang kehidupan sehari-hari pendidikan formal, yaitu guru dan sekolah. Prof. Winarno Surakhmad tentu tidak akan mampu berpuisi lagi karena harus menangis tersedu-sedu, setelah sejawatnya yang hanya tinggal dalam gubuk yang tak lebih dari kandang ayam, dicerca, dipinggirkan dan dihinakan martabatnya — sementara pemerintah belum mampu menopang seluruh biaya operasional pendidikan secara layak.

**Ketiga**, upaya peningkatan peran serta masyarakat tentu saja tidak terbatas di bidang pendidikan, sebab semua lini kehidupan dan kegiatan senantiasa membutuhkan peran serta masyarakat. Dalam kondisi negeri kita yang sedang terengah-engah karena banyaknya masalah, komponen peran serta masyarakat menjadi sangat penting, dan apabila peran serta masyarakat ini dapat dioptimalkan niscaya kondisi terengah-engah berangsur-angsur akan menjadi normal. Jadi,



*kongkow-kongkow* obral janji 'sekolah gratis' berarti mencederai diri sendiri yang kondisinya sedang terengah-engah.

**Keempat**, pencederaannya terasa semakin memprihatinkan karena mereka yang *ngobrol* di warung kopi itu justru umumnya para pemegang kebijakan entah di Jakarta sana, entah pula di tingkat kabupaten/kota. Jadi, sebagian para pengambil kebijakanlah yang punya hobi 'mencederai' rakyat. Bukankah ini sangat memprihatinkan? Bila kebijakan pemerintah umumnya, dan khususnya di bidang pendidikan berawal dari 'warung kopi', maka sebenarnya negeri ini hanya dibangun berdasarkan obrolan belaka yang tidak memiliki dasar yang kuat.

### Solusi

Kita perlu menemukan jalan keluar terbaik agar 'cedera rakyat' tidak berkembang menjadi luka kronis. Tiga pokok pikiran berikut disodorkan. **Pertama**, tidak ada yang namanya gratis dalam hidup ini. Segratis-gratisnya sesuatu pasti biaya diambil dari sesuatu yang lain yang di luar perkiraan pemikiran awam. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan hendaknya selalu proporsional ketika memutuskan suatu kebijakan dan hendaklah sangat berhati-hati memilih ungkapan dan kata. Satu kata 'gratis' saja terlontar, sejuta persepsi tumbuh di masyarakat; sampai-sampai iuran BP3 sebesar Rp 1.500,- untuk murid SD tidak dibayar oleh orang tuanya, padahal mungkin yang dibayar oleh subsidi pemerintah itu SPP yang memang sudah beberapa waktu yang lalu SPP itu tidak dibayar lagi oleh orang tua. Saya usul, Depdiknas di segala jajarannya meralat lontaran 'sekolah gratis' ini dengan ungkapan atau kata lain yang tepat, meskipun mungkin si pelontar di warung kopi itu bukan orang Depdiknas misalnya. Mengapa Depdiknas yang harus meralatnya? Wajar, karena menyangkut bidang garapannya, yaitu sekolah.

**Kedua**, Komite Sekolah perlu semakin diberdayakan. Dewasa ini, di hampir semua propinsi dan kabupaten/kota pasti telah terbentuk Dewan Pendidikan. Meskipun Dewan Pendidikan secara struktural tidak ada keterkaitannya dengan Komite Sekolah, namun dengan menggunakan pendekatan kesepakatan bersama dapatlah dilakukan upaya-upaya penguatan Komite Sekolah yang dimotori oleh Dewan Pendidikan. Dengan demikian, semakin kuatnya Komite Sekolah, semakin besarlah peran serta masyarakat dan pasti akan mampu



menepis obral-an warung kopi lainnya yang tidak mamabail akan muncul.

**Tiga**, pendidikan disebut berhasil jika institusi pendidikan mampu meningkatkan peranserta masyarakat ke dalam sekolah/pendidikan. Maka, seluruhnya peranserta masyarakat dijadikan sebagai indikator penting untuk mengukur kinerja pejabat di lingkungan Depdiknas di segala arusnya. Tugasnya, Mendiknas, para Dirjen, para Direktur dan semua bawahannya, Kepala Dinas Pendidikan dan semua jajarannya, disebut pejabat baik/berhasil jika kinerjanya membuktikan adanya peningkatan peranserta masyarakat dalam pendidikan.

#### **D. BIAYA PENDIDIKAN BUKAN MIMPI**

Membiayai pendidikan **bukanlah bermimpi**, melainkan justru harus realistis, yaitu sesuai kemampuan yang ada. Memang banyak orang berargumentasi: "Biaya pendidikan bukankah sudah tercantum dalam amandemen UUD 1945, yaitu sebesar 20% dari APBN ? Karena itu, apa pun yang sedang terjadi, pembiayaan sebesar itu harus dilaksanakan, karena sudah diamanatkan." Pertanyaannya tentu saja, apakah kemampuan APBN kita untuk membiayai sebesar itu ada, ketika konon untuk membayar hutang saja sekitar 40 % ? Bukankah jauh lebih baik jika kita meningkatkan cara-cara menggali sumber dana lain, dari masyarakat misalnya, demi peningkatan pembiayaan pendidikan ?

#### **Sampai ke Setiap Anak**

Walter W. McMahon (Jakarta, 2001) menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan perlu ada sistem dan rumusnya, dan hal itu meliputi enam pokok-pikir berikut. **Satu**, biaya dasar pendidikan hendaklah adil dan memadai; **dua**, biaya dasar pendidikan selalu harus terkait langsung dengan ongkos nyata setiap siswa. **Tiga**, biaya dasar pendidikan harus diterima langsung oleh siswa sehingga dengan cara seperti itu implementasi pendidikan menjadi sangat efisien dan rumusnya menjadi lebih sederhana. **Empat**, biaya dasar pendidikan harus disebut relatif (elastis?) dalam arti sangat mungkin berubah-ubah setiap tahunnya sesuai dengan perubahan jumlah siswa yang juga tidak selalu sama setiap tahunnya. **Lima**, biaya dasar pendidikan harus



memberi peluang luas (namun tetap ada rumusnya) bagi peran serta masyarakat, dunia bisnis, dan lain-lain; serta **enam**, biaya dasar pendidikan harus menjadi prioritas nasional.

Biaya dasar pendidikan disebut telah memadai jika pembiayaan itu telah meliputi komponen a) guru, b) buku, c) alat peraga dan penunjang pembelajaran lainnya, d) pemeliharaan gedung, dan e) kebutuhan sehari-hari seperti untuk rekening listrik, air, telepon, dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan McMahan pada 2001 antara lain menyimpulkan bahwa sampai saat itu kumulatif dari lima komponen tersebut jika dibagi dengan jumlah siswa (SD dan MI) ditemukanlah angka Rp 573.233,- Artinya, biaya dasar untuk setiap murid SD/MI ialah Rp 573.233/tahun. Juga ditemukan formula (rumus): Jika kualifikasi guru akan ditingkatkan, setiap siswa menerima buku-buku pelajaran, buku-buku untuk perpustakaan sekolah ditambah, termasuk penyediaan perangkat komputer, biaya dasar pendidikan per siswa akan mencapai Rp 1.165.000/tahun.

Angka-angka itu keluar karena komponen dan rumusnya jelas, dan yang paling utama untuk itu semua ialah **biaya dasar itu benar-benar sampai ke setiap siswa/anak**. Maksudnya, setiap siswa adalah unit analisis pembiayaan pendidikan, dan jika di tingkat SD/MI rumus maupun angka nominalnya sudah diketahui, pastilah sangat mudah untuk menemukan nominal pembiayaan pendidikan untuk setiap siswa SMP/ sederajat maupun SMA/ sederajat.

### **Kemampuan Komite Sekolah**

Pada tanggal 6 September 2004 lalu saya sangat terperanjat karena perwakilan Komite Sekolah SDN 2 Kecila, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah melaporkan secara rinci hasil rapat orangtua siswa perihal biaya pendidikan di sekolah itu. Dalam tahun ajaran 2004/2005 ini, Komite Sekolah menghitung biaya pendidikan sebesar Rp 22 juta; dan karena jumlah murid saat ini ada 210 anak, maka pembayaran/sumbangan setiap anak sebesar Rp 102.300,-/tahun, malahan lalu dibulatkan menjadi Rp 105.000,-.

Semua orang tua murid sepakat, termasuk sepakat berapa kali harus mengangsur. Anggaran satu tahun itu dirinci sebagai berikut: sebesar 57 % dialokasikan untuk **Belanja Sekolah (BS)**, yaitu untuk perbaikan atau penambahan mebelair, kapur/spidol, ATK, pemeliharaan gedung, perjalanan Kepala Sekolah, Guru atau Komite Sekolah ke



rapat-rapat, menjamu tamu, rapat-rapat, dan lain-lain. Selanjutnya, yang 43 % dialokasikan sebagai **Belanja Anak (BA)**, yaitu untuk buku-buku pelajaran, kegiatan ekstra kurikuler, lomba-lomba, LKS, tes/UAS, Pramuka, dan lain-lain. Ketika saya ajukan pertanyaan: "Bagaimana rumus 57 : 43 Anda temukan ?" dengan sangat fasih Ketua Komite Sekolah, Bapak Sairin, menjawab, "Kami telah menghitung pengeluaran setiap bulan per anak sebesar Rp 8.500,- padahal sumbangan/iuran setiap anak per bulan baru sebesar Rp 5.000,-. Angka-angka itu mendorong kami membagi pengeluaran ke dua pos, yaitu BS yang kami danai dari yang Rp 5.000,- /anak/bulan dan angka itu sebesar 57 %; sedang pos BA (43 % sisanya) harus kami cari. Rapat orang tua murid sepakat memikul tambahan Rp 3.500/bulan."

Bagaimana selanjutnya Komite Sekolah membagi tugas agar pemasukan maupun pengeluaran 'model Kecila' ini lancar? "Pemasukan maupun pengeluaran dari/untuk siswa kelas 1,2, dan 3 diurus oleh Guru Olahraga/ Kertanges; sedang yang dari/untuk kelas 4,5, dan 6 diurus oleh Guru Agama." Alasan yang dikemukakan sangat masuk akal, yaitu baik guru olahraga/ kertanges maupun agama tidak setiap jam pelajaran memegang kelas/mata pelajaran seperti guru kelas. Maka setiap kali guru olahraga dan agama itu tidak mengajar, saat itu pulalah ia dapat menggarap pembukuan, termasuk belanja barang-barang kebutuhan sekolah maupun anak.

### **Bukan Mimpi**

Kesepakatan seperti terjadi di SDN 2 Kecila tersebut pasti bukanlah mimpi dalam membiayai pendidikan. Sesuai kemampuan yang dimiliki masyarakat, Komite Sekolah jeli melihat peluang-peluang yang ada dan dengan cara seperti itulah peran serta masyarakat dapat ditingkatkan untuk membiayai pendidikan. Banyak Komite Sekolah belum berhasil menggerakkan peran serta orang tua siswa/masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anaknya karena amat banyak anggota Komite Sekolah yang bermimpi dan kurang realistis.

Ada lima tantangan besar dalam dunia pendidikan kita, dan kelimanya dapat dibiayai secara realistis. Tantangan **pertama**, sesuai dengan kesepakatan Dakar tahun 2000, kita dalam kurun waktu sampai dengan 2009 'telah berjanji' harus menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (wajar dikdas). Artinya, pada tahun 2009 nanti tidak seorang pun anak berusia 7-15 tahun tidak bersekolah. Setiap tahunnya, 2005, 2006,



2007, dan seterusnya. kita pasti sudah dapat menghitung berapa juta anak usia 7-15 tahun; sementara rumus biaya dasar pendidikan setiap anak telah ada, sehingga nominal pembiayaan pendidikannya dengan sendirinya muncul.

Tantangan **kedua** ialah pendidikan anak usia dini (di bawah lima tahun) sangat menentukan kualitas pendidikan formal nantinya. Artinya, peningkatan peran serta orangtua / masyarakat agar anak-anak di bawah lima tahun diperhatikan asupan gizi dan kesehatannya sangat penting. Tantangan **ketiga** ialah pendidikan keterampilan hidup (*life skill*), bukan saja keterampilan fisik atau mekanik yang diperlukan anak-anak seperti menukang, mengelas, dan sebagainya; melainkan justru **keterampilan bersikap** menjadi sangat utama dan penting harus dikembangkan pada anak-anak. Misalnya, ketrampilan bersikap menolak ajakan jelek, keterampilan bersikap toleran, keterampilan bersikap disiplin, dsb. (Keterampilan bersikap ini juga diberikan kepada anak-anak sekolah dasar di Belanda, lihat bab XIII Sekilas Pengalaman Pekerja Sukarela di Sekolah Dasar di Negeri Belanda, editor).

Tantangan **keempat** ialah menekan terus sehingga semakin berkurang jumlah penduduk buta aksara/huruf; dan tantangan **kelima** ialah pentingnya meningkatkan perhatian kepada pendidikan kesetaraan baik antara perempuan terhadap laki-laki, desa terhadap kota, miskin terhadap si kaya, tersingkir terhadap mereka yang beruntung, dan sebagainya.

Satu hal lagi yang dapat dicatat bahwa sistem pembiayaan pendidikan dapat diciptakan jika empat faktor pendukung terjadi di lapangan, yaitu 1) efisiensi berlangsung, 2) adil bagi semua anak, 3) memadai untuk setiap anak, dan 4) berkembang dukungan dari masyarakat. Empat faktor pendukung tersebut hendaklah dapat dijadikan 'gebrakan awal' bagi Depdiknas dalam hal memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bukankah pembiayaan pendidikan dapat menjadi compang-camping ketika KKN dibiarkan merajalela secara internal ?

(Catatan: beberapa bagian dari artikel ini pernah dimuat di surat kabar)



## BAB 14 MENGENALI ANAK CERDAS ISTIMEWA

Dr. Endang Widyorini  
Unika Soegijapranata, Semarang

- Dikerjakan dengan baik adalah lebih baik daripada dikatakan dengan baik (Anonim)-

"Bu..beberapa hari ini anakku tidak mau sekolah.... Sudah saya bujuk-bujuk, tapi ia tetap keukeuh tidak mau berangkat ke sekolah. Apa yang harus saya lakukan?" Demikian cerita awal seorang ibu (Doni adalah seorang anak berusia tujuh tahun, kelas dua SD). Lebih lanjut si ibu cerita kalau sebenarnya problem anak berawal dari kejadian beberapa hari yang lalu ada pelajaran bahasa Inggris yang kosong di kelas satu. Doni menawarkan bila minggu depan guru bahasa Inggris masih sakit ia yang akan mengajar kelas satu. Guru yang ditemui saat itu mengatakan 'ya'. Seminggu kemudian benar guru bahasa Inggris belum bisa mengajar. Tapi ia tidak diijinkan mengajar oleh pihak sekolah (...tentu saja), Doni sangat kecewa ia merasa diperlakukan tidak adil.... ia sudah mempersiapkan diri baik-baik dan ia merasa sanggup mengajar dengan baik.

Kutipan di atas adalah satu dari bermacam problem yang ditemui pada anak berbakat atau cerdas istimewa. Banyak anggapan karena mereka berkemampuan tinggi, maka mereka akan berkembang secara baik dengan sendirinya. Mempunyai anak cerdas pasti dambaan orangtua dan guru. Gambaran anak cerdas adalah anak yang nilainya bagus, mudah diatur (karena dengan kepandaiannya, mestinya anak mengerti mana yang benar dan salah). Padahal sesungguhnya tidak demikian. Kekhasan dari karakteristik sebagai anak yang berkemampuan tinggi mempunyai kerentanan untuk mempunyai beberapa masalah. Mereka sering mempunyai cara berpikir, dan ide yang kurang bisa diterima oleh sekelilingnya.

Webb (1993) menyatakan bahwa kecepatan berpikir dan energi mereka yang tinggi menyebabkan mereka cenderung memiliki problem cepat bosan di kelas, tidak suka dengan teman sebaya karena merasa



tidak sesuai dengannya. Kemandirian mereka menyebabkan mereka menyukai sendirian dan non-konformis, dsb. Tak jarang dari mereka, bukan dikenal sebagai anak cerdas istimewa, melainkan sebagai anak nakal, atau anak yang hiperaktif.

Ini yang seringkali menimbulkan kesalahan perlakuan. Mungkin kita sebagai orangtua jadi sering marah dan menghukumnya. Dan memberinya label "anak bandel", "anak sulit diatur", "anak *trouble maker*" atau mungkin label yang lebih kasar. Oleh karena itu keberadaan anak cerdas istimewa atau berbakat perlu dikenali sejak dini, sehingga pengasuhan orangtua bisa lebih tepat.

### A. IDENTIFIKASI ANAK CERDAS ISTIMEWA

Siapakah anak yang dikatakan cerdas istimewa? Anak cerdas istimewa merupakan padan kata dari kata *gifted* atau *talented*. Dulu lebih dikenal dengan istilah anak berbakat, namun sekarang pemerintah Indonesia menggunakan istilah anak cerdas istimewa. Istilah ini menggambarkan seseorang yang mempunyai potensi tinggi untuk memperlihatkan suatu tingkat prestasi yang sangat baik pada satu atau beberapa bidang tertentu. Anak cerdas istimewa lebih mengarah pada anak berbakat pada bidang intelektual atau akademik.

Seringkali orangtua maupun guru tidak mengenalinya sebagai anak cerdas istimewa, karena ia tidak menunjukkan keberbakatannya, prestasinya tidak cemerlang sebagaimana potensi yang dimilikinya, terutama bila anak cerdas istimewa tinggal di lingkungan yang tidak memberikan stimulasi yang tepat, sehingga ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Lalu bagaimanakah cara kita mengenali anak cerdas istimewa. Bahkan beberapa karakteristik yang khas sebagai anak cerdas istimewa, seperti banyak bertanya (dengan pertanyaan mengapa-bagaimana), suka "menjelajah" lingkungan, atau punya ide yang tidak lazim, menyebabkan ia dianggap sebagai anak nakal, atau merepotkan, karena itu tak jarang dari mereka mendapat banyak hukuman oleh orang-orang di sekelilingnya termasuk orangtua dan guru. Akhirnya yang tampak berkembang adalah kenakalannya bukan keberbakatannya.

Bisakah orangtua mengidentifikasi atau mengenali mereka sejak dini? Tentu saja bisa, namun perlu kecermatan, untuk bisa mengenalinya, tapi ini bukan hal yang sulit dilakukan. Amati mereka



bila perlu catatlah semua perkembangan anak dari lahir, usia berapa anak bisa tengkurap, bisa mengeluarkan kata-kata yang ada artinya, amati pula minat dan kebiasaannya. Kemudian bandingkan dengan anak-anak seusia mereka. Bila perkembangan mereka melaju lebih cepat dari anak seusianya, maka langkah berikutnya orangtua bisa berkonsultasi dengan psikolog.

Mengenali keberbakatan seorang anak memerlukan kepekaan orangtua, atau guru, karena perkembangan anak cerdas istimewa seringkali mengalami ketidaksinkronan dalam berkembang atau biasa disebut *asynchronic/dissyincronic development* (Silverman, 1998). Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena heterogenitas dari aspek-aspek perkembangan itu sendiri. Artinya ada seorang anak cerdas istimewa yang di awal perkembangan sangat aktif, tetapi ia mengalami keterlambatan bicara. Kemampuan yang menonjol pada anak ini adalah kemampuan mengamati semua yang ada di sekitarnya, semua yang dia lihat dia ingat dan dia pelajari dengan baik. Anak seperti ini sering disebut sebagai *gifted child with spatial visual learner*. Sementara ada anak cerdas istimewa yang sangat pandai bicara, kemampuan menyusun kalimat bagus dan kosa katanya banyak.

Biasanya anak cerdas istimewa ditunjukkan oleh skor IQ yang tinggi (di atas 130). Namun ternyata tidak sekedar IQ untuk bisa menunjukkan kecerdasannya, perlu kreativitas dan aspek-aspek kepribadian, seperti komitmennya pada tugas atau motivasi. Seringkali orangtua maupun guru tidak mengenalinya sebagai anak berbakat, karena ia tidak menunjukkan keberbakatannya, prestasinya tidak cemerlang sebagaimana potensi yang dimilikinya, terutama bila anak berbakat tinggal di lingkungan yang tidak memberikan stimulasi yang tepat, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi bisa dikatakan bahwa mengenali anak berbakat tidak bisa mengabaikan pengamatan terhadap beberapa karakteristik mereka yang unik. Secara umum ada beberapa hal yang merupakan ciri khas dari mereka, antara lain :

1. Mampu membaca sebelum masuk sekolah.
2. Perkembangan bahasa lebih cepat, perbendaharaan kata lebih banyak.
3. Suka mencari tahu jawaban dari 'bagaimana' dan 'mengapa' tentang sesuatu hal.
4. Mampu bekerja mandiri sejak kecil, dan melakukan pemusatan



- perhatian yang baik.
5. Mempunyai minat yang luas, bervariasi dan mendalam.
  6. Mempunyai energi tinggi, membutuhkan waktu lebih pendek untuk tidur.
  7. Berhubungan baik terhadap orangtua, guru, dan orang dewasa lain.
  8. Suka mempelajari sesuatu yang baru.
  9. Mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan efisien.

Sedangkan ciri-ciri anak kreatif adalah:

1. Mampu berpikir lancar dan luwes terhadap suatu kemungkinan atau alternatif suatu pemecahan masalah.
2. Mereka berpikir original, selalu mencari sesuatu yang baru, tidak lazim, dan mampu mengkombinasikan beberapa informasi.
3. Mereka dapat berpikir yang runtut, langkah demi langkah.
4. Mereka seringkali menyadari impulsivitas, irasionalitas, serta sensitivitas yang ia miliki.
5. Mereka suka memainkan daya fantasinya
6. Mereka banyak ide, dan sering tidak setuju dengan statement anak lain.

## B. FAKTOR YANG BERPENGARUH

Sering orangtua bertanya bisakah membuat anak kita supaya menjadi anak dengan kecerdasan yang istimewa? Anak *gifted* atau anak cerdas istimewa tidak bisa dibentuk. Selain nutrisi dan kesehatan, faktor bawaan adalah faktor penting yang memunculkan kecerdasan istimewa. Hanya untuk mengoptimalkannya perlu faktor-faktor pendukung. Seperti dikatakan Monks (1994) dalam teorinya yang disebut *The Multifactor Model* dikatakan bahwa kecerdasan istimewa akan berkembang optimal bila ada dukungan dari orangtua, sekolah, dan teman sebaya (masyarakat). Kurt Heller (2001) dalam teorinya *The Munich Model of Giftedness*, menjelaskan bahwa berkembangnya kecerdasan dipengaruhi banyak hal termasuk motivasi berprestasi anak, iklim dalam kelas dan proses belajar, dan suasana dalam keluarga.

Dari penelitian yang pernah dilakukan, kecerdasan istimewa banyak dimiliki oleh anak tunggal, atau anak sulung. Lebih banyak pada anak laki-laki atau perempuan? Ternyata jumlahnya seimbang,



hanya bidang-bidang unggulan pada masing-masing berbeda. Kebanyakan perempuan lebih unggul pada kemampuan matematika, dan linguistik, sedang anak laki-laki lebih banyak pada kemampuan mekanikal.

Mampukah stimulasi yang diberikan sejak dini pada anak akan membuatnya menjadi anak *gifted* atau cerdas istimewa? Stimulasi itu pasti bermanfaat, meningkatkan kemampuan anak, namun bila anak tidak memiliki bawaan cerdas istimewa, ia akan berkembang optimal sesuai dengan potensinya, namun tidak menjadi anak *gifted*.

### C. PROBLEMA ANAK CERDAS ISTIMEWA

Seringkali orangtua setelah tahu anaknya cerdas istimewa (*gifted*), mereka akan mendorong anak untuk berprestasi setinggi-tingginya. Anak harus belajar banyak, tahu lebih banyak, mendapat nilai baik dan tidak boleh mendapat nilai di bawah teman-temannya. Pada akhirnya orangtua akan terus mendorong....dan tanpa disadari menjadi menuntut (atau biasa disebut *overexpectation*) pada anak untuk selalu bisa dan berhasil, tanpa memperhitungkan kesulitan-kesulitan lain yang ditemui anak.

Pada kenyataannya mereka seperti halnya anak-anak lainnya mereka sering berhasil dan juga bisa gagal. Mereka butuh dipahami dan didukung oleh orangtua. Mereka termasuk anak-anak yang perlu kita bimbing. Banyak anggapan karena mereka berkemampuan tinggi, maka mereka akan berkembang secara baik dengan sendirinya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Kekhasan dari karakteristik sebagai anak yang berkemampuan tinggi mempunyai kerentanan untuk mempunyai beberapa masalah.

Seorang psikolog, Webb (2001) menyatakan bahwa kecepatan berpikir dan energi mereka yang tinggi menyebabkan mereka cenderung banyak gerak dan ingin mencoba banyak hal. Karena rasa ingin tahu, mereka membongkar banyak barang (dan kemungkinan "merusak") karena tidak bisa mengembalikan ke bentuk semula. Mereka di kelas melamun atau malah usil, sebagai reaksi dari rasa bosan di kelas, karena pelajaran dirasakan lamban dan tidak menantang, mungkin mereka menjadi pendiam karena tidak suka dengan teman sebaya karena merasa tidak



sesuai dengannya. Kemandirian mereka menyebabkan mereka menikmati kesendirian dan non-konformis, dsb.

#### **D. APA YANG BISA DILAKUKAN?**

Hal-hal seperti yang telah diuraikan di atas merupakan permasalahan yang dimiliki oleh anak cerdas istimewa sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka miliki. Hendaknya mereka dibesarkan dalam pengasuhan orangtua yang responsif, antara lain :

1. Memberi kesempatan bagi anak untuk bersosialisasi dengan anak lain yang memiliki kemampuan berpikir setara.
2. Pilihlah sekolah yang tepat, karena mereka membutuhkan tugas-tugas kelas (pelajaran) yang cukup menantang dengan kemampuan berpikirnya. Perlu meminimalkan kebosanan yang terjadi, karena sebagian besar waktunya di sekolah, sementara populasi anak cerdas istimewa sangat sedikit.
3. Anak berbakat membutuhkan pemahaman yang realistis dari keluarga, sekolah, dan masyarakat pada umumnya tentang karakteristiknya yang unik.
4. Anak cerdas istimewa butuh didengarkan dan dihargai pendapatnya. Mereka tidak bisa demikian saja melakukan hal, seperti yang orangtua katakan. Dia membutuhkan orangtua yang penuh penjelasan dan mau mendengarkan pendapatnya.
5. Memerlukan bantuan untuk menemukan minat dan mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi minatnya dengan lebih mendalam. Seringkali mereka mempunyai minat yang tidak biasa, oleh karena itu bimbingan dan pengarahan dari orangtua dan guru sangat diperlukan.
6. Mereka membutuhkan bantuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Beberapa karakteristik mereka seperti mandiri, non-konformis, cara berpikir dan minat yang berbeda membuat mereka lebih suka menarik diri, karena itu tidak jarang mereka adalah anak yang kesepian.
7. Anak-anak cerdas istimewa membutuhkan masa kanak-kanak, dan ini seringkali menjadi sesuatu yang membingungkan bagi orang di sekelilingnya. Misalnya seorang anak pada usia 5 tahun yang berkembang (cara berpikirnya) sangat pesat tentang alam semesta dan kehidupan, tetapi pada usia 8 tahun ia mulai sangat suka



menonton film, semisal "Teletubbies". Perkembangan yang nampak seperti "kembali ke belakang" ini merupakan akibat pada masa sebelumnya minat dan perhatian dia terfokuskan pada hal-hal jauh ke depan. Ini mengherankan orang di sekelilingnya karena ada satu kecenderungan atau anggapan karena perkembangan berpikirnya yang luar biasa maka ia juga tidak boleh bertindak *childish*. Hal ini adalah salah karena anak cerdas istimewa perlu diberi kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya dengan cara yang mereka pilih sendiri.

8. Anak-anak cerdas istimewa hampir selalu butuh bantuan sejak usia dini untuk mengatur terlalu tingginya standard atau sifat perfectionist terhadap diri sendiri. Orangtua juga perlu membantu mereka menentukan aktivitas yang diminatinya. Karena kebiasaan menetapkan standard keberhasilan yang tinggi dan keinginan untuk selalu *perfect* pada pekerjaannya menyebabkan mereka frustrasi, depresi dan tidak bahagia, terutama bila ada anggapan bahwa ia hanya akan diterima oleh orangtua, guru, atau orang di sekelilingnya bila mencapai prestasi tinggi.

#### E. BAGAIMANA PEMBINAANNYA?

Pada umumnya anak cerdas istimewa mendapatkan keuntungan bila berada di kelas dengan teman yang setara kemampuannya (*intellectually peer group*). Pendidikan yang tepat, sebaiknya program pendidikan dirancang sesuai dengan kemampuan anak. Guru berespon yang baik terhadap kebutuhan anak. Keterbukaan, suasana yang fleksibel, pemberian kesempatan untuk memilih, mandiri, dan kreatif, adalah lingkungan yang paling tepat bagi mereka (Silverman & Leviton, 1991). Pendidikan untuk anak cerdas istimewa membutuhkan diferensiasi kurikulum, secara umum menurut Davis & Rimm (1998) mereka dapat mengambil tiga jalur: a) pengayaan (*enrichment*), b) pendalaman (*extension*), dan c) percepatan (*acceleration*).

Pemerintah Indonesia, telah beberapa kali mencoba program pendidikan khusus untuk anak cerdas istimewa, seperti kelas unggulan dan sebagainya, namun kurang berkembang baik. Saat ini pemerintah menerapkan program akselerasi, yaitu suatu program percepatan untuk anak cerdas istimewa, misalnya untuk menyelesaikan sekolah menengah pertama (SMP) seharusnya tiga tahun, dalam program akselerasi mereka menyelesaikannya dalam waktu dua tahun. Namun



untuk saat ini pemerintah mengembangkan beberapa program untuk anak cerdas istimewa, selain akselerasi, antara lain *early entry*, *grade skipping*, atau akselerasi subjek, pengayaan (*enrichment*), atau pendalaman (*extention*).

Program pengayaan perlu dipikirkan bagi anak cerdas istimewa agar ia mendapatkan pemenuhan akan pelajaran yang lebih sesuai dengan kemampuannya, terutama bagi anak yang cerdas istimewa pada satu atau dua bidang studi, nampaknya program tersebut lebih tepat, daripada akselerasi. Feldhusen (1992) menyatakan program akselerasi akan baik dampaknya bila seorang anak bersikap positif untuk masuk percepatan (akselerasi/lompat kelas). Dengan demikian ia akan melakukan penyesuaian sosial yang bagus.

Pelaksanaan pendidikan khusus untuk anak cerdas istimewa di Indonesia seringkali masih terhambat oleh hal-hal seperti keterbatasan sarana prasarana, sehingga optimalisasi anak cerdas istimewa yang orangtuanya kurang mampu secara ekonomi masih relatif kurang. Selain itu juga kurang pemahaman orangtua dan guru mengenai karakteristik anak cerdas istimewa, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan (*needs*) anak cerdas istimewa. Faktor lain yang nampak cukup menonjol adalah kompetensi atau sumber daya guru yang memadai untuk mengajar anak cerdas istimewa.

## E. PENUTUP

Mengingat bahwa anak cerdas istimewa merupakan suatu generasi penerus yang berpotensi tinggi, yang diharapkan kelak mereka bisa menghasilkan karya yang gemilang, maka tidak perlu ditanggapi orangtua dengan emosional, sehingga orang tua menjadi cemas dan ambisius. Namun sebaiknya kita pahami karakteristiknya, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kognisi, emosi, dan sosial. Pilihlah sekolah yang tepat untuk pendidikannya. Bacalah artikel-artikel mengenai anak-anak cerdas istimewa, bila perlu konsultasi pada ahlinya. Dengan pengasuhan yang tepat, memberi dukungan, tanpa banyak menuntut, maka diharapkan anak akan berkembang optimal, selaras, dan yang penting mereka bahagia.



## BAB 15

# PENTINGNYA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI KEGIATAN BERMAIN

Yulianti Siantayani, M.Pd,  
*Praktisi BUKIT AKSARA Preschool Semarang*  
*Forum PAUD & Himpaudi Propinsi Jawa Tengah*

*- Kehidupan yang paling menyenangkan sesungguhnya kehidupan imajinasi.  
Karena itu jangan pernah mengungkung imajinasi seseorang (Jules Verne) -*

### A. PENDAHULUAN

Banyak orang berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini bukanlah suatu hal yang penting bagi proses perkembangan anak. Mereka beranggapan bahwa justru pendidikan di jenjang setelah PAUD-lah yang lebih penting. Mereka juga beranggapan di pendidikan tingkat SMU dan perguruan tinggilah anak-anak akan berkembang, karena mereka berpikir bahwa pendidikan di tingkat itu mampu mempersiapkan anak pada dunia kerja. Pendapat tersebut tidaklah sepenuhnya keliru.

Pentingnya pendidikan anak usia dini didasarkan pada kajian neurologis yang mengatakan bahwa otak bayi saat lahir mengandung 100 milyar neuron yang siap melakukan sambungan antar sel. Selama tahun-tahun pertama, otak bayi berkembang sangat pesat dengan menghasilkan bertrilyun-trilyun sambungan antar neuron. Rangsangan-rangsangan yang diberikan kepada anak pada tahun-tahun pertama akan memperkuat sambungan tersebut, namun sebaliknya tanpa rangsangan, maka justru akan terjadi penyusutan bahkan pemusnahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bloom mengungkapkan bahwa sekitar 50 % kapabilitas kecerdasan manusia terjadi ketika anak berusia 0-4 tahun, 80% terjadi saat anak berusia 4-8 tahun, dan mencapai titik kulminasi saat anak berusia 18 tahun. Artinya, bahwa kecerdasan seorang manusia 50 % diperoleh pada masa empat tahun pertama, dan 50% lagi selama 14 tahun berikutnya.

Dengan beraktivitas dan bermain sel-sel otak membutuhkan dan menyerap gizi dan oksigen, selanjutnya sel-sel otak akan tumbuh dan berkembang membentuk jaringan sel otak yang baru.



## BAB 18

### PENGALAMAN PEKERJA SUKARELA DI SEKOLAH DASAR DI NEGERI BELANDA

Yvonne S. Mulyati

*Mantan Guru Bimbingan dan Penyuluhan SLTP-SLTA di Jakarta  
Pekerja Sukarela di Basis School Freinet Delft, Belanda*

*- Menjadi pribadi yang sehat jauh lebih berharga  
dibanding gunung emas (Carl Gustav Jung) -*

Tahun ajaran sekolah di Belanda dimulai dari Agustus sampai dengan Juni tahun berikutnya. Sekolah mulai di bulan Agustus setelah 6 minggu liburan kenaikan kelas dan liburan musim panas. Kelas grup 1 dan 2 belum terisi penuh dengan siswa baru, mungkin hanya setengah dari jumlah maksimaal baru terisi, mengapa demikian?

Seorang siswa mulai masuk sekolah tidak serentak pada bulan Agustus, tapi sejak hari ulang tahunnya yang ke 4, contoh Tineke berulang tahun tanggal 10 September, maka pada tanggal itu pula ia mulai sekolah, Roel berulang tahun pada tanggal 6 Februari, maka pada tanggal itu pula ia mulai sekolahnya. Pada prakteknya tentu saja dapat bergeser satu hari sampai 2 minggu, bila kebetulan hari itu hari Sabtu, atau 1 hari sebelum hari liburan, maka siswa tersebut masuk setelah hari liburan tersebut.

Di Belanda ini, jadwal sekolah-liburan sekolah dibagi 3 bagian yaitu Belanda bagian utara, tengah dan selatan. Hal ini besar pengaruhnya untuk hal-hal lainnya, misalnya tempat rekreasi, tempat vakantie misalnya hotel, camping area, lalu-lintas baik jalan raya maupun kendaraan umum seperti kereta api.

Sebagai contoh:

Awal tahun ajaran bagian Utara 4 September 2006

Awal tahun ajaran bagian Tengah 28 Agustus 2006

Awal tahun ajaran bagian Selatan 21 Agustus 2006

Jadi liburan selama 6 minggu tersebut tidak bersamaan, tetapi tetap ada minggu-minggu saat seluruh Belanda libur sekolah.  
Liburan musim gugur bagian Utara-Tengah 21 Oktober – 29 Oktober



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. **Dr. PAUL SUPARNO** adalah dosen pendidikan fisika pada Universitas Sanata Dharma (USD), Yogyakarta. Mendapatkan gelar BA filsafat pada STF Driyarkara, Jakarta 1975; sarjana Ilmu Pasti Alam pada IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1982; sarjana Filsafat Teologi pada Institut Teologi Wedabhakti, Yogyakarta, 1982; gelar MST Fisika pada Boston College, 1992; dan doktor pendidikan sains pada Boston University, AS, 1996. Pernah menjadi dekan FKIP, USD tahun 1997-2001; dan Rektor USD tahun 2001-2005.

Buku pendidikan yang telah diterbitkan antara lain: *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, penerbit Kanisius (1997); *Roh Baik dan Roh Jahat* (1998); *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget* (2001); *Problema Manusia Indonesia*, (eds.) (2001); *Menuju Pembelajaran Aktif*, (eds, dkk) (2001); *Reformasi Pendidikan*, (dkk) (2002); *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah*, (dkk) (2002); *Pendidikan Budi Pekerti untuk SMA-SMK*, (dkk) (2003); *Teori Inteligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah* (2004); *Pendidikan Budi Pekerti di SMP* (2004); *Guru Demokratis di Era Reformasi*, Grasindo (2004); dan *Miskonsepsi dan Perubahan Konsep Pendidikan Fisika* (2005).

2. **ANITA LIE, Ed.D.** lahir di Surabaya, 1 Juni 1964, menempuh pendidikan Sarjana Sastra Universitas Kristen Petra, Indonesia, English Literature, 1987; Master of Arts Baylor University, English Literature, 1991; Doctor of Education Baylor University, Curriculum and Instruction, 1994.

Kegiatan Akademis:

- Dosen Luar Biasa FKIP, Universitas Widya Mandala, 2002-sekarang
- Dosen Program Studi Sastra Inggris, Universitas Kristen Petra, 1987-2002.
- Penguji Eksternal Tesis dan Disertasi Department of English, Chinese University of Hong Kong, 2002.

Pernah sebagai **Dosen Tamu** pada SEAMEO Jasper Lecture/Study Tour dan dosen tamu di 11 universitas di luar negeri.

**Dosen Senior Luar Biasa** Business Communication and Intercultural Communication International Business Management Program, UK Petra, 1999-2001.

**Konsultan Pendidikan** Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Buah Hati, Sekolah Ciputra (IB World School), SDK Cita Hati (IB World School), SDK Masa Depan Cerah, Xin Zhong School, sekolah-sekolah di



bawah koordinasi Tanoto Foundation, Universitas Kristen Krida Wacana dan Universitas Ciputra, 1995-sekarang  
**Pelatih dan Mentor** pada Petra Christian University Teaching Excellence Circle, 1995-2001, Persekutuan Misi Keluarga PESAT, 2006; Pengembangan Profesionalisme Guru dan Kepala Sekolah, Tanoto Foundation, 2006.

#### **Kegiatan Administratif**

- Direktur EduBusiness Consulting, Surabaya, 2002-sekarang.
- Direktur Akademis Sentra Foreign Languages and Heritage Language School, 2004-sekarang.
- Dekan, Fakultas Sastra Universitas Kristen Petra, 1999-2002.
- Memberikan masukan kepada Gubernur Jatim dalam proses penyusunan Grand Design Pendidikan Jawa Timur.
- Penanggung Jawab, program Community Development dalam proyek IMHERE (Indonesia: Managing Higher Education Relevancy and Efficiency) di Universitas Katolik Widya Mandala yang didanai oleh Bank Dunia melalui Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.

#### **Organisasi Profesi**

- Sekretaris Jenderal, Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Timur (2003-2008).
- Anggota, Dewan Pakar Propinsi Jawa Timur (2003-2005).
- Pendiri, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (2004-2009).
- Anggota, Phi Delta Kappa.
- Anggota, Sigma Tau Delta.
- Anggota, International Reading Association
- Anggota, TESOL.

#### **Publikasi**

Menulis buku, editor dan kontributor 15 buku yang diterbitkan penerbit dalam dan luar negeri. Menulis 15 Makalah dalam Jurnal Ilmiah dalam dan luar negeri (1992-2000), 6 Makalah Seminar/Konperensi Ilmiah; 46 presentasi dalam seminar dan kongres dalam dan luar negeri 1998-2002); 7 Penelitian (1994-200) dan Puluhan artikel di media massa artikel Populer atau Semi Ilmiah.

3. **DARMANINGTYAS** lahir di Gunungkidul, 18 September 1962, pendidikan Sarjana Filsafat UGM, 1990; selebihnya banyak belajar sendiri (otodidak).

#### **Pengalaman dalam pendidikan**

1. Memulai terjun ke dunia pendidikan pada Agustus 1982 dengan menjadi guru honorer di SMP Binamuda dan SMA Muhammadiyah Panggang, Gunungkidul. Di SMP Binamuda itu mulai tahun 1986 sudah



- mengembangkan Manajemen Bersis Sekolah (MBS) dan beberapa eksperimen dalam pengembangan sekolah.
2. Pada tahun 1986 bersama beberapa kawan randa mendirikan 6 TK di Kecamatan Panggang, Gunungkidul, DIY, yang sampai sekarang juga masih berjalan.
  3. Menulis masalah-masalah pendidikan sejak tahun 1983.
  4. Banyak melakukan penelitian dan fasilitasi dalam bidang pendidikan.
  5. Menulis beberapa artikel tentang pendidikan dan transportasi untuk harian, terutama di Kompas.

**Buku yang ditulis:**

1. *Pendidikan pada dan Paska Krisis* (Pustaka Pelajar, 1999).
2. *Pulung Gantung : Menyingkap Tragedi Bunuh Diri di Indonesia* (Salwa Press, 2002).
3. *Pendidikan yang Memiskinkan* (Galang Press, 2004).
4. *Pendidikan Rusak-rusakan*, (LKIS, 2005).

Juga menulis dalam:

1. "Pendidikan Itu Memang Multikultural" dalam *Pendidikan Itu Memang Multikultural*, sebuah gagasan (Yayasan SET, Jakarta, 2002).
2. "Yang Disembunyikan dalam Praktek Pendidikan" dalam *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru, 70 tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar* (Grasindo, 2002).
3. *FIKIR, Catatan Seorang Pendidik, Suster Francesco Marianti, OSU* (Grasindo, 2002).
4. "Prasana, Sarana, dan Buku, Cermin Retak Pendidikan Nasional dalam *Pendidikan Manusia Indonesia* (Grasindo dan Yayasan Toyota Astra, 2004, editor Tony Widiastono).
5. "Ilusi tentang Profesionalisme Guru" dalam *80 Tahun: J.Drost*, Universitas Sanata Dharma, 2005.
6. Beberapa tulisan di Majalah BASIS, Yogyakarta.

Aktivitas sehari-hari selain menjadi Country Director ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) Indonesia, juga pengurus Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (YSIK), Perkumpulan PRAXIS, aktif di CBE (Center for the Betterment of Education) di Jakarta, dan Pengurus Majelis Luhur Taman Siswa. Juga Pengurus MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia). Jadi selain tahu masalah-masalah pendidikan, juga tahu masalah transportasi. Untuk Jakarta, terlibat dalam ITDP, yaitu NGO yang memberikan bantuan teknis kepada Pemda DKI Jakarta untuk membangun busway.



4. **J.C. TUKIMAN TARUNASAYOGYO (J.C. Tukiman Taruna)**, lahir di sebuah desa di Kabupaten Bantul, DIY, 27 Desember 1948 dari keluarga petani, sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Menempuh pendidikan di SPG karena ada ikatan dinas dan segera ingin bekerja (sebagai guru). Keinginan itu terkabul, namun hanya dua tahun menjadi guru SD, lalu melanjutkan sekolah di IKIP Sanata Dharma (lulus 1978), seraya bekerja di berbagai sekolah sebagai guru. Selanjutnya, pada tahun 1991 lulus S2 dari IPB Bogor dalam bidang Sosiologi Perdesaan, dan pada 1996 lulus S3 dari University of the Philippines Los Banos (UPLB) dalam major Community Development. Ia lalu bekerja di berbagai lembaga internasional seperti CCF, UNDP, UNESCO, dan terakhir UNICEF, dan semua kegiatannya selalu berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan, perdesaan, dan kemasyarakatan. Ia juga mengajar di program pascasarjana di sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UNDIP (Magister Ilmu Lingkungan), UNNES (Magister Manajemen Pendidikan), UNS (Magister Penyuluhan Perdesaan), UNTAG (Magister Administrasi Publik), dan UNIKA Soegijapranata Semarang (Magister Manajemen Sekolah).

5. **ERIC RUMONDOR** dilahirkan di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 1956.

Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada Yayasan Dana Surabaya, melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga (UKSW). Setelah setahun kuliah di UKSW, melanjutkan kuliah di Negeri Belanda, di Delft Technical University, Electrical Engineering Department, Control Group. Lulus ditahun 1985. Sebagai tugas akhir, merancang sistim pengaturan otomatis dari pembuatan etanol secara bioteknik.

Untuk beberapa saat menjadi tenaga peneliti di Biotechnology Department dari Technical University Delft. Kemudian menjadi Development Engineer di Engineering Consultant di Amsterdam, terlibat dalam perancangan dari sistim pengaturan mesin listrik dari derek untuk Semi Submersible Offshore Crane Vessel, dimana up scaling, speed dan precision amat dipentingkan. Akhir tahun 1987 kembali ke Technical University Delft, sebagai subject specialist di University Library untuk informasi Teknik Elektro. Saat ini menangani pula informasi untuk Matematika dan Teknik Computer. Merupakan bagian dari tugas untuk melacak dan mensuplai informasi kepada para peneliti dalam rangka mengajukan hak paten, apabila diduga ada penemuan baru. Menikah dengan Yvonne S. Mulyati, guru dengan spesialisasi Bimbingan dan Penyuluhan.

Menulis tentang sistim pendidikan dasar dan lanjutan di Negeri Belanda ini, bukan sebagai seorang ahli dibidang ini, melainkan sebagai pengamat awam dan minat pribadi.



**6. Prof Dr. MUNGIN EDDY WIBOWO, M.Pd. Kons.,** lahir di Banjarnegara, 20 Nopember 1952.

Pendidikan SR, SMPN, dan SPGN ditempuh di Banjarnegara. Tahun 1976 lulus Sarjana Psikologi dan Bimbingan Konseling, FIP-IKIP Semarang, tahun 1993 lulus Magister Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling IKIP Malang, tahun 2001 lulus Doktor Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Sejak tahun 1977 menjadi dosen tetap FIP-UNNES, Semarang. Di UNNES pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Statistik, Tim SP4, SIM, RIP IKIP Semarang, Pembina Kemahasiswaan Bidang Penerbitan Mahasiswa IKIP Semarang, Pemimpin Umum Majalah Kampus, Ketua Tim Penatar AA (Applied Approach), Ketua Tim Penatar Program Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI), sampai sekarang masih menjabat sebagai Tim Penatar AA dan PEKERTI UNNES. Pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling IKIP Semarang, Ketua Pusat Penelitian Pengembangan dan Kebijakan Pendidikan Lemlit UNNES, Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Pascasarjana UNNES.

Sejak tahun 1980 mengikuti lebih dari 15 pendidikan tambahan di Indonesia di bidang Konseling, Psikologi, dan Training of Trainer di bidang Program PEKERTI, AA, Program Akreditasi Tutor UT, P4, dsb. Sejak 2002 sebagai Anggota Senat Guru Besar UNNES dan Anggota Senat Guru Besar FIP-UNNES.

Kegiatan di luar UNNES, Pernah sebagai Ketua Tim Penatar program PEKERTI, Ketua Tim Penatar Dosen Wali PTS Kopertis Wilayah VI Jateng, Ketua Tim Penatar PEKERTI dan AA di berbagai PTS di Jawa Tengah, Dewan Redaksi di beberapa jurnal pendidikan di beberapa universitas.

Jabatan yang sekarang masih dipegang: Tim Akreditasi BAN, Jakarta, Tim Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang (sebagai pakar Pendidikan), Tim Penyusun Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, Tim Fasilitator Hibah P3AI TPSDP Dikti Depdiknas, Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Tim Evaluasi Penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama.

Aktif di berbagai kegiatan profesi, seperti Sekretaris Umum Ikatan Pendidik Konselor Indonesia, Ikatan petugas Bimbingan Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah dan Pusat, anggota Association of Psychology and Educational Counsellors of Asia (APCA), Ikatan Sarjana Konseling Indonesia, PGRI, Ikatan sarjan Pendidikan Indonesia, dsb



Telah menulis 25 judul buku, 12 makalah yang dimuat dalam Jurnal, dan menulis lebih dari 70 artikel yang dimuat di berbagai surat kabar.

Pernah memperoleh penghargaan sebagai mahasiswa teladan I IKIP Semarang (17 Agustus 1975), Dosen teladan I IKIP Semarang (27 September 1984 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI), Jasa-Jasa dalam Peningkatan Dosen Akpol (5 Maret 1991 dari Gubernur Akademi Kepolisian), dsb.

**7. Prof. Dr. MULYONO ABDURRAHMAN** lahir di Ngawi, 14 Maret 1944, bekerja sebagai dosen di Jurusan PLB FIP Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Jabatan: Ketua Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pascasarjana UNJ.

**Pendidikan formal:** Sekolah Rakyat Negeri di Ngawi (1957), SGB Negeri di Ngawi (1961), KPG Negeri di Jakarta (1969), Sarjana Muda Jurusan Pendidikan Umum, FIP IKIP Jakarta (1972), Sarjana Jurusan Pendidikan Khusus, FIP IKIP Jakarta (1975), Akta Mengajar V, Jakarta (1982), Magister Pendidikan Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta (transfer ke S3) (1985), Doktor Pendidikan Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta (1990)

**Pendidikan non formal:** Penataran P3G di Jakarta (1979), Pengembangan Sistem Instruksional (1980), Alih Kepakaran di bidang Pendidikan Anak Berbakat dari Prof. Dr. Conny R. Semiawan (1992), Alih Kepakaran di bidang Pendidikan Anak Kesulitan Belajar dari Prof. Dr. Titik Imam Sajono (1992), Workshop Evaluasi Diri, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (1995), International Training on Human Right, Strasbourg (Perancis) (2004).

**Pekerjaan:** Guru SD Negeri di DKI Jakarta (1963-1976), Sukarelawan Guru Dwikora di Perbatasan Kalimantan Barat (1964-1966), Dosen Jurusan PLB FIP IKIP Jakarta/UNJ sejak 1976, Special Educationist pada Bagian Psikiatri Anak Rumah Sakit Jiwa Jakarta (1975-1977), Special Educationist pada Bagian Terapi Edukatif Sanatorium Dharmawangsa Jakarta (1977-1987), Ketua Jurusan PLB FIP IKIP Jakarta (1981-1984), Supervisor Program Remedial Teaching di Perguruan Katholik Santo Bellarminus Jakarta (1985-1992), Pembina Bidang Kurikulum Perguruan Islam Al Azhar Kemang dan Al Azhar Kelapa Gading (1987-1992), Member of Australian/Indonesian Taskforce's on Special Education (1999), Ketua Jurusan PLB FIP IKIP Jakarta (1991-1995), Pembantu Dekan I FIP IKIP Jakarta (1995-1998), Dekan FIP UNJ (1998-2005), dosen Program Pascasarjana UNJ (1998- sekarang), Ketua Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pascasarjana, UNJ, Dosen Program Pascasarjana



UHAMKA (2000- sekarang), Dosen Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2000- sekarang).

**8. Drs. PAULUS HARIYONO, MT**, lahir di Yogyakarta tahun 1962. Menyelesaikan studi sarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada tahun 1988, menyelesaikan Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro tahun 2002. Bekerja di Universitas Katolik Soegijapranata tahun 1989, ditugaskan di program studi Arsitektur, pernah menjadi anggota Pusat Studi Wanita Unika Soegijapranata (1990-1995), Pusat Studi Urban (1997-2002). Kepala Pusat Dokumentasi Lemlit (1994-1996) dan Kepala Pusat Studi Etika (2003-2005), Ketua Redaksi Jurnal Arsitektur dan Desain Tesa (2007-2000).

Telah melakukan lebih dari 13 penelitian dengan topik: pembagian peran secara seksual, persoalan etnis China dan Jawa, Sosiologi Kota, Hubungan sosial budaya dan desain arsitektur. Telah menulis lebih dari 17 makalah untuk seminar nasional dan internasional, jurnal dan surat kabar.

Buku yang pernah ditulis:

- *Kultur Cina dan Jawa, Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, 1993, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- *Pemahaman Kontekstual Tentang Ilmu Budaya Dasar*, 1996, Yogyakarta, Kanisius.
- *Stereotip dan Persoalan Etnis China di Indonesia*, Semarang, Mutiara Wacana, 2006.
- *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*, 2007, Jakarta, Bumi Aksara.

**9. St. KARTONO**, lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 3 September 1965. Lulus IKIP Sanata Dharma tahun 1993. Mengajar di SMA Kolese De Britto sejak 1991 hingga kini. Mengikuti program pertukaran guru di Adelaide, Australia, 1999. Menjadi wakil kepala sekolah hingga 2002.

**Kolomnis pendidikan** di BERNAS, Kompas, Kedaulatan Rakyat, BASIS. Tulisannya pernah singgah di Solo Pos, Suara Pembaruan, Radar Jogja, Forum Keadilan, Media, Studi, Warta Ubaya, Bianglala, MATABACA, GERBANG.

Memforumkan gagasan: TVRI Yogyakarta, Radio Trijaya FM, Sonora, Eltira, Retjobuntung, Bikima, Petra, Rakosa, Unisi, dan berbagai seminar pendidikan.

**Menulis buku:**

1. *Menabur Benih Keteladanan* (2001)
2. *Menebus Pendidikan Yang Tergadai* (2002)
3. *Reformasi Pendidikan* (2003, dkk)
4. *Seri Pendidikan Budi Pekerti* (2003-2004, dkk)



### Artikel dalam buku antologi:

1. Pendidikan Bebas Menuju Pribadi Mandiri (Yayasan De Britto, 1999).
2. Surat Bagimu Negeri, Mengenang Romo Mangun (KOMPAS, 1999).
3. Membuka Masa Depan Anak-anak Kita (Kanisius, 2000).
4. Biarkan Berita Bicara (Universitas Atma Jaya, 2001).
5. Pendidikan Berbasis Kompetensi (Universitas Atma Jaya, 2002).
6. Jejak Sepercik Kenangan (Seminari Mertoyudan, 2004).
7. Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi (UIN Sunan Kalijaga, 2004).
8. Bahasa Merajut Sastra Merunut Budaya (Universitas Sanata Dharma, 2005).

### Menulis Kata Pengantar:

- *Perkelahian Pelajar* (Buku Hasballah M. Saad /Mantan Men-HAM, 2003)
- *Sang Guru* (Buku LPM – UNY, 2006)

### Aktivitas lain saat ini:

1. Ketua Komite Sekolah, SD Kanisius Demangan Baru, Yogyakarta
2. Sekretaris Komite Sekolah, SMA Negeri 6, Yogyakarta.
3. Ketua Bidang Sosialisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, Propinsi DIY.

**10. Prof. Dr. CONNY R. SEMIAWAN** mengenyam pendidikan Doktor Kependidikan IKIP Jakarta tahun 1978 *Major: Rehabilitation Counseling*. Tahun 1962 Sarjana FKIP Jurusan Psikologi Pendidikan Universitas Indonesia.

### Pelatihan

1. Tahun 1999 *Workshop Quality Assurance in Higher Education*, New Castle University, England (sertifikat).
2. Tahun 1997 Seminar *Higher Education Accreditation Procedure*, Australia (laporan).
3. Tahun 1983 Seminar *Strategic Planning*, Lemhanas Jakarta (lihat foto piagam).
4. Tahun 1976 USAID *Award International Institute Education: Guidance and Counseling* di USA (laporan lihat lampiran penghargaan internasional).
5. Tahun 1975 belajar di Negeri Belanda, *Ministerie Culture Recreatie & Maatschappelijk Werken*, Nederland, Orthopedagogik (laporan).
6. Tahun 1958 Diploma B I dan B II Ilmu Pendidikan Bandung, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Tahun 1957 *Training Test Construction*, Universitas Pejajaran, Lembaga Penelitian Pendidikan.



### Riwayat Pekerjaan

1. Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud BP3K, Tahun 1980-1986.
2. Guru Besar IKIP Jakarta Golongan IV/e (mengajar di Program Pasca Sarjana, membimbing thesis dan disertasi), Tahun 1984 - sampai 2001.
3. Rektor IKIP Jakarta, Tahun 1984 - 1988 (Termin I), Tahun 1989 - 1992 (Termin II).
4. Ketua Konsorsium Ilmu Pendidikan Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 1989 - 1994, dan Tahun 1994 - 1999.
5. Konsultan Domestik, Komponen B, Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar IBRD-Loan 3496, Bank Dunia, Tahun 1992 - 1999.
6. Ketua Komisi Disiplin Ilmu Pendidikan DPT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, Tahun 1999 - 2002.
7. Anggota Dewan Riset Nasional (Kementrian Ristek), Tahun 1994 sampai dengan saat ini.
8. Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Tahun 1999 - 2003.
9. Guru Besar Emeritus pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, tahun 2000 sampai dengan saat ini.
10. Anggota Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (Kementrian Ristek).

**11. Dr. ENDANG WIDYORINI**, lahir tanggal 7 Februari 1960. Menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana Psikologi Universitas Gadjah Mada, Studi Doktor! diselesaikan di Radboud University, Nijmegen, Belanda. Bekerja sebagai staf pengajar Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang, kini menjabat sebagai Ketua Program Magister Psikologi Unika Soegijapranata.

**11. Dr. STEFANUS SOEJANTO SANDJAJA, M.Si.** lahir di Semarang, 6 Juni 1962. Pendidikan 1967-1974 TK & SD Xaverius Semarang, 1975-1977 SMP Domenico Savio Semarang, 1978-1980/81 SMU Kolose Loyola Semarang, 1982-1986 Psikologi Pendidikan & Bimbingan (S-1) Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes Semarang, 1990-1993 Psikologi Pendidikan (S-2) Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 1997 Pendidikan Dosen Kewiraan Lemhannas Jakarta, 2006 lulus Doktor Psikologi Pendidikan (S-3) UGM Yogyakarta.

#### Pekerjaan

- a. 1987 - 1989: Dosen FKIP UKSW Salatiga.
- b. 1989 - 1990: Konselor SMU K Petra 2 Surabaya.
- c. 1992 - skrg. : Dosen Fak. Psikologi Unika Soegijapranata Semarang.



- d. 1996 – skrg. : Dosen PGSD Soegijapranata Bawen.
- e. 1998 – skrg. : Konsultan Personalia PT Indo Plastik Semarang.

**Pelayanan**

- a. 1979 – 1995 : Guru Sekolah Minggu GPPS Semarang.
- b. 1996 – sekarang: Dosen STT Abdiel Ungaran.

**12. YVONNE S. MULYATI** lahir di Cirebon 6 Maret 1961. Menyelesaikan pendidikan SMA di BPK Penabur Cirebon, Sarjana pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan IKIP Jakarta.

**Riwayat pekerjaan**

- 1987-1994 sebagai Guru BP di SMPK BPK Penabur Jakarta.
- 1994-2000 sebagai Guru BP di SMUK BPK Penabur Jakarta.
- 1987-1993 pekerja paruh waktu sebagai koordinator sekretariat Institut Binsis dan Manajemen OTC Jakarta
- 1994-2000 pekerja paruh waktu sebagai Training and Recruitment Manager Auntie Anne's Soft Pretzels Jakarta.
- 2000 menikah dengan Eric Rumondor
- 2003 sebagai pekerja sukarela di Basis School Freinet Delft, Belanda.





# MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Buku ini ditujukan bagi mereka yang menginginkan wacana perubahan pendidikan yang lebih baik. Mereka adalah pendidik, pemerhati dan pembuat kebijakan dalam pendidikan dasar dan menengah (serta perguruan tinggi), orang tua siswa, mahasiswa, dan siapa saja yang peduli akan kemajuan pendidikan di negeri ini.

Era globalisasi merupakan era yang tidak mudah diprediksi arahnya. Untuk menghadapinya dibutuhkan *manusia-manusia yang berkualitas* yang mampu beradaptasi dan berinovasi dalam segala situasi. Karena itu pendidikan sebaiknya mencetak manusia yang siap menghadapi masa depan yang tidak jelas itu.

Penting dalam sekolah, diberi kesempatan yang luas bagi siswa untuk belajar menentukan hidupnya, pikirannya, dan pergulatannya dan juga *berpikir khaostis* terhadap masa depannya. Karena itu dibutuhkan keterbukaan dalam kurikulum, bahan dan model pembelajaran, pengelolaan kelas, bahkan juga keterbukaan relasi antara guru/dosen, siswa/mahasiswa, orang tua, sekolah/perguruan tinggi, yayasan, dinas, dan pengambil kebijakan tingkat nasional. Dengan kata lain dibutuhkan **DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN** dari tingkat nasional, kedinasan, yayasan, sekolah, guru, yang semuanya akan bermuara pada peserta didik. Relasi ini dibutuhkan agar jangan sampai terjadi segala sesuatu diputuskan dan dilakukan tetapi setelahnya tidak ada gunanya, terlebih bila terjadi pada peserta didik.

Secara sporadis, bagian kedua buku ini menyoroti **NILAI-NILAI PENDUKUNG** yang seharusnya terjadi dalam proses belajar mengajar dan mengungkap berbagai "salah kaprah" yang terjadi pada pendidikan kita dewasa ini.

Anak pada era kini berbeda dengan anak era yang lalu dan akan berbeda lagi dengan anak pada era yang akan datang. Karena itu perlu dikenali secara cermat potensi anak yang sebenarnya yang akan diulas pada bagian ketiga buku ini dibawah judul **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**. Pemahaman ini sangat penting untuk menyiapkan anak-anak dalam menyongsong masa depan yang penuh tantangan, kompetisi, dan khaostis.

**MUTIARA  
WACANA**

Srondol Bumi Indah K-3  
Semarang 50269

ISI DAN KIRIMKAN  
ANGKET  
BARHADIAH PADA  
HALAMAN AKHIR

ISBN 979-15337-1-7